

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024



PALEMBANG, JANUARI 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

Palembang, Januari 2025

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan ini mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 060/047/SE/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan LKjIP Tahun 2024 memuat rencana kegiatan, perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, target dan realisasi indikator kinerja, perhitungan indikator kinerja dan evaluasi capaian indikator kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Palembang, Januari 2025

Pib. KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



SUSILO HARTONO, S.Hut., M.Si.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 197212081999031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) berisikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam laporan ini juga menjelaskan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis kegagalan dan keberhasilan target kinerja, program dan kegiatan.

Implementasi program dan kegiatan APBD 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan diturunkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan. Renstra merupakan rencana jangka menengah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi arah kebijakan, program dan penganggarannya. Tahun 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta 14 (empat belas) UPTD KPH mengimplementasikan rencana pembangunan kehutanan terhadap 5 (lima) sasaran, 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang harus dicapai dengan dukungan dana dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 58.503.146.664,-. Sumberdana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana reboisasi, dan DBH Perkebunan Sawit. Dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tersebut, terealisasi sebesar Rp. 54.497.856.540,- atau 93,15% dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,15%.

Lima sasaran dan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktifitas Kawasan Hutan.

Pada sasaran pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya dengan tingkat capaian 122,3%.

2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pada sasaran ke-2 (kedua) terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: (a) Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) dengan tingkat capaian 475%. (b) Persentase Luas

Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) dengan tingkat capaian 349,67%.

3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan.

Pada sasaran ke-3 (ketiga) terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Luas lahan kritis yang di Luar Kawasan Hutan yang dilakukan penanaman dengan tingkat capaian 1.300% dan b. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%) dengan tingkat capaian 157,14%.

4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial.

Pada sasaran ke 4 (keempat) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok). Indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 117,86% targetnya.

5. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Pada sasaran ke-5 (kelima) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%). Indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 95,45%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	11
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika	12
F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi.....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis	16
B. Rencana Kinerja	18
C. Perjanjian Kinerja	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	35
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	41
3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra	46
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	47
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	48
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	63
E. Analisis Pengarusutamaan Gender	77
F. Data Dukung Pencapaian Kinerja.....	83

G. Inovasi.....	129
H. Penghargaan.....	130
BAB IV. PENUTUP	132
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan	3
Tabel 2.	Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024	7
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	10
Tabel 4.	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Rekomendasi.....	13
Tabel 5.	Sasaran dan Strategi Dinas Kehutanan.....	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	32
Tabel 7.	Skala nilai peringkat kinerja.....	35
Tabel 8.	Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	35
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	43
Tabel 10.	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	46
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2023	47
Tabel 12.	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	49
Tabel 13.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024	52
Tabel 14.	Perbandingan Capaian Program/Kegiatan/sub Kegiatan terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024	58
Tabel 15.	Analisis Kegagalan dan Keberhasilan Program dan Kegiatan	65
Tabel 16.	Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender pada Dinas Kehutanan Tahun 2024.....	78
Tabel 17.	Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender pada UPTD KPH Tahun 2024	81
Tabel 18.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1	84
Tabel 19.	Realisasi pembayaran PNPB Tahun 2024	85
Tabel 20.	Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2024	86
Tabel 21.	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024	87

Tabel 22.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2.....	91
Tabel 23.	Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan.....	94
Tabel 24.	Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2024	96
Tabel 25.	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran.....	99
Tabel 26.	Anggaran Bidang PDAS-RHL Tahun 2024 (APBD Perubahan)	99
Tabel 27.	Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan	102
Tabel 28.	Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan.....	105
Tabel 29.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2024	109
Tabel 30.	Jumlah Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2010 - 2024	112
Tabel 31.	Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO.....	114
Tabel 32.	Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2024	117
Tabel 33.	Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial.....	119
Tabel 34.	Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan).....	120
Tabel 35.	Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 3.	Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	19
Gambar 4.	Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	21
Gambar 5.	Pelibatan Perempuan dalam kegiatan pembangunan kehutanan	83
Gambar 6.	Realisasi luasan produksi PBPH tahun 2024 (Sumber Data : SIPASHUT, 2024)	88
Gambar 7.	Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH.....	89
Gambar 8.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan	90
Gambar 9.	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	91
Gambar 10.	Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH	95
Gambar 11.	Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan UPTD KPH VIII Semendo.....	97
Gambar 12.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH.....	98
Gambar 13.	Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2024.....	104
Gambar 14.	Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah di UPTD KPH	107
Gambar 15.	Penanaman Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah	107
Gambar 16.	<i>Training Of Trainer</i> Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh ICRAF.....	111

Gambar 17. Verifikasi Teknis Permohonan Persetujuan Kemitraan Konsesi Antara PT ESA YASA DINAMIKA (PT EYD) dengan KTH Rawas Ulu Bersatu Di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara	114
Gambar 18. Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan	116
Gambar 19. Pendampingan Kelompok Tani Hutan	116
Gambar 20. Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Kehutanan	130

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, yang secara rinci diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat ikhtisar kinerja instansi yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Tujuan pelaporan kinerja diantaranya (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 didasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian *outcome* pada 5 Program dan capaian output pada 36 sub kegiatan yang tertuang pada Dokumen Renja Tahun 2024. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan

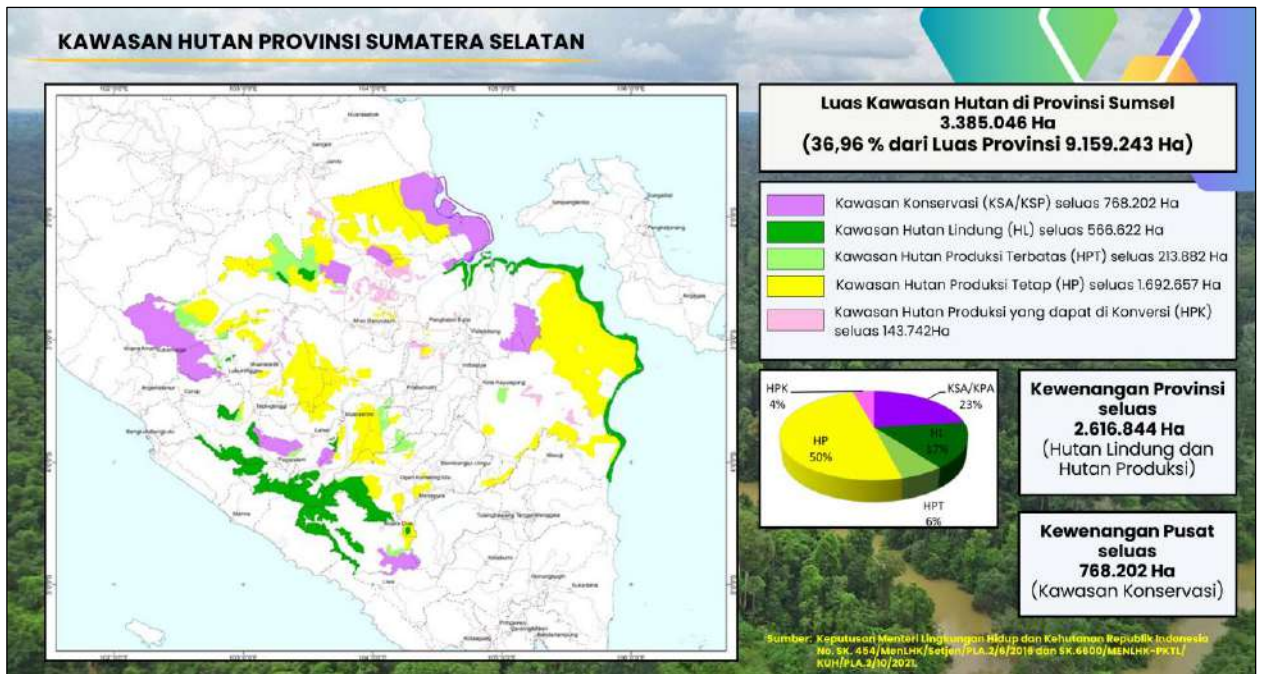
kewajiban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang kehutanan dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menetapkan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan.

Kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan seluas 36,96% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 3.385.046 ha terdiri dari Hutan Konservasi seluas 768.202 ha, Hutan Lindung seluas 566.623 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 213.822 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 1.692.657 ha dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 143.742 ha. Kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi, sedangkan Hutan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.



Gambar 1. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 1. Sebaran Kawasan Hutan Menurut Fungsi Hutan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha)											
		Taman Nasional			TWA	Tahura	CA	SM	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah
		Daratan	Perairan	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab. Banyuasin	215.835,27	48.808,57	264.643,84	-	-	-	80.225,55	62.775,94	-	64.083,82	31.234,04	502.963,17
2	Kab. Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	2.558,57	65.918,95	4.555,02	3.229,74		76.262,28
3	Kab. Lahat	-	-	-	172,90	-	-	53.451,38	52.045,01	4.400,56	26.945,73		137.015,58
4	Kab. Muara Enim	-	-	-	-	-	-	8.700,01	57.735,69	26.606,08	152.638,27	8.615,75	254.295,79
5	Kab. Musi Banyuasin	2.482,13	200,87	2.683,00	-	-	-	55.664,01	15.428,71	90.373,99	416.893,30	58.464,98	639.507,98
6	Kab. Musi Rawas	72.303,52	-	72.303,52	-	-	-	-	943,73	4.671,61	158.162,72	19.868,85	255.950,42
7	Kab. Musi Rawas Utara	168.062,36	-	168.062,36	-	-	-	-	1.136,40	43.297,25	109.171,80	1.136,57	322.804,38
8	Kab. Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,30	352,45	452,75
9	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	14.555,94	96.836,45	10.034,50	644.347,15	24.069,56	789.843,60
10	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	68.751,56	17.450,74	58.989,41	-	145.191,71
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	61,28	-	61,28	-	-	-	40.855,22	115.078,78	10.247,44	7.720,03	-	173.962,75
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	-	-	2.852,88	-	25.996,00	-	28.848,88
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.378,41	-	24.378,41
14	Kota Lubuklinggau	4.214,46	-	4.214,46	-	-	-	-	1.154,67	1.027,77	-	-	6.396,91
15	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	25.964,12	-	-	-	25.964,12
16	Kota Palembang	-	-	-	50,33	-	-	-	-	-	-	-	50,33
17	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157,38	-	-	1.157,38
Jumlah Tahun 2022 s.d. 2023		462.959,01	49.009,44	511.968,45	223,23	-	-	256.010,67	566.622,90	213.822,34	1.692.656,66	143.742,19	3.385.046,44
Jumlah Tahun 2021		462.959,01	49.009,44	511.968,45	223,23	-	-	256.010,67	501.060,93	213.734,10	1.690.839,50	143.742,19	3.317.579,06
Jumlah Tahun 2019 s.d. 2020		467.705,93	48.991,54	516.697,47	223,23	-	-	269.482,89	561.078,93	213.688,39	1.690.839,50	145.356,92	3.392.638,12
Jumlah Tahun 2018		471.944,76	46.808,40	518.753,76	223,23			269.456,10	577.651,00	213.918,28	1.696.133,39	148.084,87	3.424.220,63

Sumber : Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Untuk pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan;
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang didekonsentrasikan;
4. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

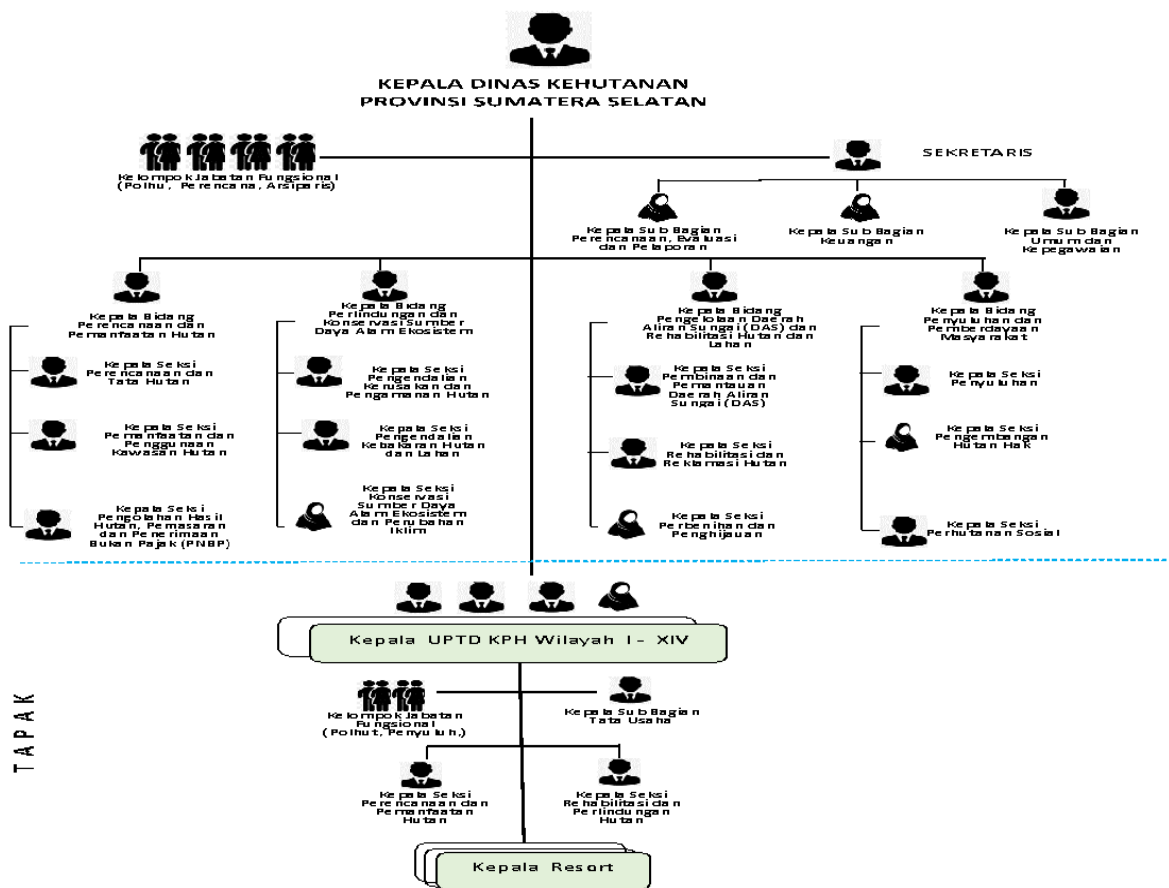
Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan. Tugas UPTD yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan serta melaksanakan fasilitasi pengembangan unit-unit KPHP dan/atau KPHL dalam wilayah kerjanya. Dinas Kehutanan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KPH berkedudukan di 16 kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. UPTD KPH Wilayah I Meranti berkedudukan di Sekayu;
2. UPTD KPH Wilayah II Lalan - Mendis berkedudukan di Bayung Lencir;

3. UPTD KPH Wilayah III Palembang - Banyuasin berkedudukan di Palembang;
4. UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Ridong berkedudukan di Kayu Agung;
5. UPTD KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji berkedudukan di kayu Agung;
6. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura berkedudukan di Batu Raja;
7. UPTD KPH Wilayah VII Mekakau - Saka berkedudukan di Muara Dua;
8. UPTD KPH Wilayah VIII Semendo berkedudukan di Muara Enim;
9. UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji berkedudukan di Prabumulih;
10. UPTD KPH Wilayah X Dempo berkedudukan di Pagar Alam;
11. UPTD KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah berkedudukan di Lahat;
12. UPTD KPH Wilayah XII Benakat berkedudukan di Talang Ubi;
13. UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong berkedudukan di Lubuk Linggau
14. UPTD KPH Wilayah XIV Rawas berkedudukan di Muara Rupit.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Kehutanan sebagai implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, serta mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terdiri dari: (1) Polisi Kehutanan; (2) Penyuluh Kehutanan; (3) Fungsional Perencana; dan (4) Fungsional Arsiparis.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dukungan SDM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera per bulan Juni tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2. Status dan Kompetensi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024

No	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	STATUS/KOMPETENSI (ORANG)							JML
		PNS				NON PNS			
		STRUKTURA L/ NON	FUNGSI- ONAL POLHUT	FUNGSI- ONAL PENYULUH	FUNGSI-ONAL PERENCANA	PTT PAMHUT DALKAR	PEGAWAI PPTPK	TKS	
1	Dinas Kehutanan	75	16	11	6	2	0	26	136
2	UPTD KPH Wilayah I Meranti	5	1	2	0	1	1		10
3	UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis	6	0	4	0	10	0		20
4	UPTD KPH Wilayah III Palembang- Banyuasin	17	0	5	0	3	2		27
5	UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur- Riding	8	0	2	0	3	1		15
6	UPTD KPH Wilayah V Lempuing- Mesuji	9	0	4	0	8	1		22
7	UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti- Martapura	21	0	10	0	1	2		34
8	UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka	15	0	4	0	1	1		21
9	UPTD KPH Wilayah VIII Semendo	9	0	3	0	2	2		16
10	UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji	7	0	5	0	5	0		16
11	UPTD KPH Wilayah X Dempo	17	0	2	0	4	0		23
12	UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	7	2	5	0	1	1		16
13	UPTD KPH Wilayah XII Benakat	6	1	3	0	8	0		17
14	UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong	15	1	6	0	9	1		32
15	UPTD KPH Wilayah XIV Rawas	10	1	0	0	8	1		20
	Jumlah	227	21	64	6	61	13	26	418
	Total PNS dan Non PNS	318				100			418

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Juni 2024

Secara terinci profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan baik yang ditempatkan di Kantor Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	JABATAN /STATUS	JML (Org)	PENDIDIKAN (Org)							JENIS KELAMIN (Org)	
			S3	S2	S1	D4	D3	SMA	<SMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A.	Pegawai Negeri Sipil										
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	0
2	Pejabat Eselon III	19	1	14	4	-	-	-	-	18	1
3	Pejabat Eselon IV	55	-	27	27		-	1	-	44	11
4	Pelaksana	163		25	115	3	14	4	2	90	73
5	Polisi Kehutanan	21	-	4	13	-	-	4	-	17	4
6	Penyuluh Kehutanan	64	-	6	54	1	-	3	-	38	26
7	Perencana	6	-	4	2	-	-	-	-	4	2
	Jumlah ASN	318	1	81	215	4	14	12	2	212	117
B.	Non Pegawai Negeri sipil										
1	Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD)	10	-	1	6	-	2	2	-	2	8
2	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	16	-	1	8	-	1	6	-	13	3
3	Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan (PPTPK)	13	-	-	10	-	-	3	-	7	6
4	Pegawai Tidak Tetap Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan (PTT Pamhut dan Dalkar)	61		-	-	-	-	61	-	48	13
	Jumlah Non PNS	100	0	2	26	0	4	84	0	85	31
	Jumlah PNS dan Non PNS	418	1	83	208	4	18	96	2	282	136

Sumber Data: Sekretariat Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Juni 2024

SDM berstatus PNS dan Non PNS berjumlah 418 orang, 76,08% berstatus PNS dan 23,92% berstatus Non PNS yang terdiri dari: Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD) Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan (PPTPK), Pegawai Tidak Tetap Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan (PTT Pamhut dan Dalkar).

Proporsi gender di Dinas Kehutanan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki 282 orang (67,46%) dan pegawai perempuan 136 orang (32,54%). Lebih dari setengah pegawai dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berpendidikan S1 (208 orang, 50,49%), S2 (83 orang, 20,15%), SLTA/ sederajat (96 orang, 23,3%), D4 dan D3 memiliki nilai yang sama (22 orang, 5,24%), dibawah SMA (2 orang, 1 %), dan paling sedikit S3 (1 orang, 0,3 %). Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 19 Eselon 3 yang terdiri 1 Kesekretariatan dan 4 bidang teknis dan 14 (empat belas) UPTD Kesatuan Pengelolaan hutan yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi dan mengelola

hutan negara seluas 3.457.859 ha (37,50% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan).

Pegawai di Kantor Dinas cukup besar (32,53%) dan selebihnya tersebar di 14 UPTD. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura dan UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong memiliki jumlah pegawai yang paling banyak 32 dan 34 orang, sedang UPTD KPH Wilayah I Meranti memiliki jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu 10 orang. Jumlah pegawai UPTD yang lainnya memiliki sebaran pegawai yang beragam 16 sampai dengan 27 orang. Pegawai non PNS ini sangat dibutuhkan terutama di UPTD.

Luas wilayah kerja masing-masing UPTD cukup besar tidak diimbangi dengan jumlah tenaga teknis kehutanan yang ada di setiap KPH. Berdasarkan standar jangkauan pengawasannya, areal hutan seluas 10.000 Ha dipantau oleh 1 orang Polisi Kehutanan. Jumlah pegawai yang tidak seimbang ini menyebabkan lemahnya kontrol terhadap gangguan hutan seperti illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa liar.

Selain itu kurang tenaga penyuluh juga menjadi kendala dalam pembinaan Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dan kegiatan pengelolaan hutan lainnya. Dengan demikian UPTD perlu didukung oleh pegawai dengan kompetensi Penyuluh dan Pegawai Pendamping Petugas Teknis kehutanan.

Dukungan sarana dan prasarana pada lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terutama pada kantor UPTD belum sepenuhnya memadai. Ruangan kantor masih berupa sewa Gedung atau pinjam pakai dengan Pemerintah Kabupaten yaitu UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah di Lahat dan UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti di Baturaja.

Sarana kerja pada Kantor KPH juga belum memadai terutama sarana komputer dan transportasi. Kedua alat itu sangat penting untuk menunjang operasional UPTD dalam melaksanakan sosialisasi/patroli pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan, serta pendampingan masyarakat dalam Perhutanan Sosial. Sementara itu, rasio personal computer dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk maupun UPTD KPH belum cukup memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat kecepatan pelayanan publik.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah (Unit)			Nilai (Rp)
		Dinas	UPTD	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tetap				
1,1	Tanah				
1.1.1	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol II	14	1	15	
1.1.2	Tanah Bagunan Rumah Negara Gol III	0	3	3	
1.1.3	Tanah Bangunan Gedung	0	0	0	
1.1.4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	28	32	
1.1.5	Tanah Kosong yang tidak digunakan	3	0	3	
1.1.6	Tanah Lapangan tenis	1	0	1	
1.1.7	Tanah Bangunan Pos Jaga	0	4	4	
1,2	Peralatan dan Mesin				
1.2.1	Jeep	6	2	8	
1.2.2	Mini Bus	8	2	10	
1.2.3	Mesin proses lain-lain	7	0	7	
1.2.4	Station Wagon	1	2	3	
1.2.5	Ranger double		1	1	
1.2.6	Kendaraan Dinas Bermotor (hibah)	1	1	2	
1.2.7	Pick Up	1	5	6	
1.2.8	Sepeda motor	42	150	192	
1.2.9	Kendaraan Roda tiga		34	34	
1.2.10	Portable water Pump	1	0	1	
1.2.11	Portabel Generating set	1	0	1	
1.2.12	Pompa lain-lain	4	0	4	
1.2.13	PC	19	24	43	
1.2.14	Laptop	9	44	53	
1.2.15	Notebook	16	21	37	
1.2.16	GPS	8	57	65	
1,3	Gedung dan Bangunan				
1.3.1	Rumah Negara Golongan 1	7	1	8	
1.3.2	Rumah Negara Golongan 2	2	5	7	
1.3.3	Rumah Negara Golongan 3	29	6	35	
1.3.4	Bangunan gedung Permanen	11	40	51	
1.3.5	Bangunan gedung Semi Permanen	0	4	4	
1.3.6	Pos jaga Permanen	0	6	6	
1,4	Jalan, Jaring dan Irigasi				
1.4.1	Bangunan air bersih	1	0	0	
1,5	Aset tetap lainnya				
1,6	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	
2	Aset lainnya				
2,1	Kemitraan dengan pihak ke 3	0	0	0	
3	Aset Tidak berwujud				
3,1	Aset Tidak berwujud	NA	NA	NA	
4	Aset Lain-lain				
4,1	Aset Lain-lain	NA	NA	NA	

Sumber Data: Sekretariat Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Juni 2024

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah.
2. Pemulihan Lahan kritis yang belum optimal
3. Penyelesaian permasalahan lahan kawasan hutan
4. Kurangnya tenaga teknis kehutanan.
5. Perlindungan Kawasan Hutan dan Mangrove
6. Sarana prasarana untuk pengelolaan hutan kurang memadai

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 5587 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Susunan Organisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 41).

E. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tatakerja
- C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika
- F. Rekomendasi

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023
 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
 3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra
 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

- B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan
- C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- E. Data Dukung Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

F. Hasil Evaluasi SAKIP dan Rekomendasi

Hasil valuasi SAKIP Dinas Kehutanan Tahun 2023 belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga belum ada rekomendasi dan tindak lanjut.

Tabel 4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan Rekomendasi

No.	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Agar Perencanaan Kinerja pada Dinas Kehutanan	
	a. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Menengah dengan tepat waktu	Mengupload dokumen Perencanaan paling lambat Pebruari 2024
	b. Menetapkan Target dalam Perencanaan Kinerja untuk dapat dicapai dengan baik;	Melakukan Evaluasi pencapai target kinerja
	c. Setiap Pegawai hendaknya dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam organisasinya	Melakukan Evaluasi pencapaian kinerja individu terhadap kinerja organisasi
2	Agar pelaksanaan pengukuran kinerja;	Melakukan pengukuran kinerja pada kesekretariatan, Bidang dan UPTD secara berjenjang dan mendokumentasikan dengan lengkap
	a. Dapat menimbulkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang baik.	
	b. Dilaksanakan berkala dan terstruktur;	
	c. Dilakukan oleh seluruh unit kerja dalam organisasi (mulai dari	

No.	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
	Sekretariat yang terdiri dari 3 bagian sampai dengan seluruh Bidang Teknis); d. Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; e. Mengambil dokumentasikann secara lengkap; f. Pengukuran kinerja hendaknya dapat mempengaruhi penyesuaian (Refocussing) Organisasi secara signifikan; g. Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	
3.	Agar pelaksanaan pelaporan kinerja menghasilkan: a. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP Tahun 2023 yaitu: – Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); – Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya apabila target kinerja belum tercapai secara maksimal. – Informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara jelas; – Informasi dalam laporan kinerja berkala secara maksimal dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. b. Dapat mempublikasikan Laporan kinerja dengan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada semester awal tahun berikutnya;	Menyusun LKjIP 2024 dengan informasi : 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja); 2. Informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta Upaya nyata dan/atau hambatannya apabila target kinerja belum tercapai secara maksimal. 3. Informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara jelas; 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala secara maksimal dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Mengupload LKjIP paling lambat bulan Februari 2024

No.	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT
	c. Mengajukan permintaan reviu Laporan kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP dan Reviu LPPD.	Mengajukan permintaan revieu kepada APIP paling lambat bulan Februari 2024
4.	Agar Hasil Evaluasi Laporan kinerja berkala Dinas Kehutanan:	
	a. Dapat menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara keseluruhan;	Melaporkan ke Inspektorat Daerah tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2023
	b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kedepan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan.	Laporan perbaikan kinerja Tahun 2024 berdasarkan Tahun 2023

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pembangunan kehutanan kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Di Sumatera Selatan pengelolaan sektor kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu pengelolaan yang berorientasi pada kayu menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut : “ **Pengelolaan Hutan Secara Lestari** ”

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam tiga tahun sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran dan Strategi Dinas Kehutanan

No.	Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)
2	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)
3	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)
5	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)

Sumber Data: Renstra Dishut Tahun 2024-2026

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
		TUJUAN/SASARAN	2024	2025	2026
Peningkatan Pengelolaan Hutan Secara Lestari	1 Meningkatnya Produktifitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rp)	73.795.118.040	77.484.874.860	81.359.117.148
	2 Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	36	61	82
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	10,51	12,19	15,76
	3 Mengurangi Luas Lahan Kritis di dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	10	20
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,14	0,14
	4 Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	175	200
	5 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100

Sumber Data : Renstra Dishut Tahun 2024-2026

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

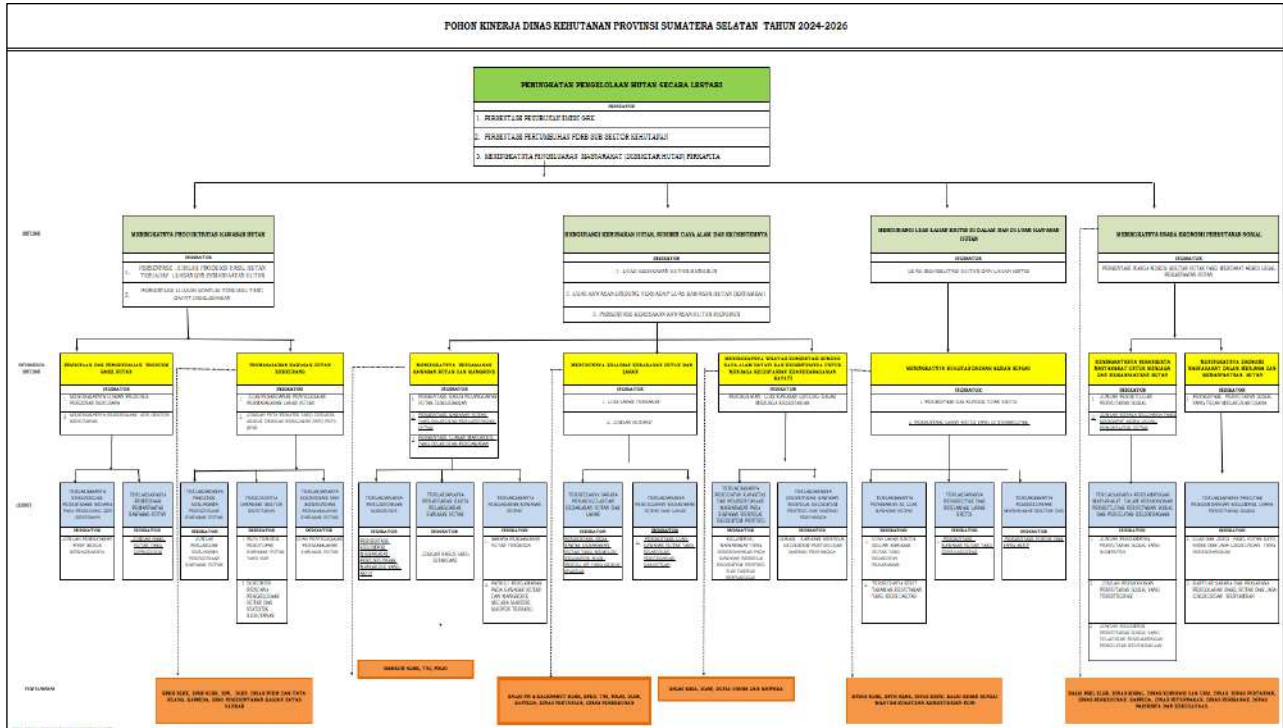
Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengelolaan Hutan Lestari	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya	Rp. 73.795.118.040,-
	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	36 Lokasi
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	10,51%
	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 Hektar
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14%
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	140 Kelompok
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

Sumber Data : Renstra Dishut Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis (Pohon Kinerja /Cascading). Skema pohon kinerja bertujuan mencari atau menentukan akar permasalahan, diharapkan mendapatkan fokus kinerja yang menjadi prioritas.



Gambar 3. Pohon Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 didukung anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada Rencana Kerja Tahun 2024, terdapat perbedaan target dari Renstra Transisi Dinas Kehutanan Tahun

2024-2026 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. Sumberdana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana reboisasi, dan DBH Perkebunan Sawit.

Alokasi anggaran tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja Induk yang ditetapkan sebagaimana DPA Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024. Selama tahun anggaran 2024 terdapat beberapa kali perubahan DPPA yaitu Perubahan mendahului Perkada, Perubahan Kedua, dan Perubahan pada APBD-P. Pada Perubahan APBD mendahului Perkada ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 6 Februari 2024, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 6.026.800.235,- sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 51.129.029.700,- menjadi Rp. 57.155.829.935,- dengan rincian anggaran pergeseran dan/atau penambahan terdapat pada Belanja Operasi semula Rp. 51.129.029.700,- menjadi Rp. 56.965.153.235,- dan Belanja modal semula Rp. 0,- menjadi Rp.190.676.700,-.

Kemudian pada Perubahan Kedua yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 6 Februari 2024, tidak dapat penambahan atau pengurangan hanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan.

Selanjutnya Perubahan pada APBD-P sebagaimana DPPA Nomor DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/002/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 7.374.116.964,- sehingga total pagu anggaran Dinas Kehutanan semula Rp. 51.129.029.700,- menjadi Rp. 58.503.146.664,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi : Rp. 58.503.146.664
Belanja Pegawai : Rp. 45.862.016.364,-
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 12.641.130.300,-

Belanja Modal : 0

Alokasi masing-masing program seperti gambar berikut :



Gambar 4. Program dan Pagu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sesuai pagu dan indikator output sub kegiatan dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					52.326.864.564,00	Sekretaris
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				226.000.000,00	Sekretaris
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU dan melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan	100.000.000,00	Sekretaris
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan UPTD serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja	126.000.000,00	Sekretaris
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				45.931.561.564,00	Sekretaris
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	45.638.736.364	Sekretaris
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Menyiapkan pembayaran honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan	223.280.000,00	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
				honorarium pejabat pengada barang dan jasa		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	69.545.200,00	Sekretaris
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				42.000.000,00	Sekretaris
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	Melaksanakan pengamanan BMD	42.000.000,00	Sekretaris
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.000.000,00	Sekretaris
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.000.000,00	Sekretaris
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.000.000,00	
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.318.000.000,00	Sekretaris
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor/bangunan Dinas dan UPTD	39.000.000,00	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	Sekretaris
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan UPTD	140.000.000,00	Sekretaris
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas dan UPTD	52.000.000,00	Sekretaris
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan /surat kabar/majalah/ tabloid	12.000.000,00	Sekretaris
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menyiapkan konsumsi atas kunjungan tamu dan rapat Dinas Kehutanan dan UPTD	85.000.000,00	Sekretaris
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan konsultasi/rapat pembangunan kehutanan pada tingkat Dinas dan UPTD	940.000.000,00	Sekretaris
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.000.000,00	Sekretaris
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.080.032.000,00	Sekretaris
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di Dinas dan UPTD	15.000.000,00	Sekretaris
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas dan UPTD	645.732.000,00	Sekretaris
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga malam, Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kehutanan, Tenaga administrasi dan Tenaga operator komputer, dan instruktur senam.	3.419.300.000,00	Sekretaris
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				660.271.000,00	Sekretaris
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, asuransi, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	567.000.000,00	Sekretaris
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menyediakan pemasangan dan pemeliharaan absensi kepegawaian, Pemeliharaan	93.271.000,00	Sekretaris

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
				Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas dan UPTD.		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					5.628.100.700,00	
i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				43.000.000,00	Kabid PPH
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	100	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	43.000.000,00	Kabid PPH
ii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				184.975.000,00	Kabid PPH
23	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	100	Updating Data Penutupan hutan dan Statistik Kehutanan Pelaksanaan/Penyediaan Data dan Informasi terkait Optimalisasi PNPB	94.950.000,00	Kabid PPH

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	100	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring Evaluasi Peredaran Hasil Hutan	90.025.000,00	Kabid PPH
iii	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				4.129.500.200,00	Kabid PDAS RHL
25	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL		100	Melaksanakan Pengumpulan Data Sossekbud, Biofisik, Kelembagaan, Rechecking Lapangan serta Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi, dengan Instansi Lain	265.200.000,00	
26	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	10,00	Melakukan Pembangunan Penghijauan Lingkungan diluar Kawasan Hutan Negara dan koordinasi kegiatan di tingkat KPH serta Acara Simbolis Penanaman dan Monev penanaman	1.753.711.300,00	Kabid PDAS RHL
27	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Laha	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100	Melaksanakan Koordinasi dan Pembangunan Bangunan DAM Penahan, Bangunan Gully Plug, Bangunan SRA, di Wilayah UPTD KPH	539.736.000,00	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
28	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100	Melaksanakan Penyusunan Rantek, Korrdinasi dan Monev	399.667.000,00	
29	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	100	Melakukan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan, identifikasi tanaman rehab DAS paska P2, Koordinasi, survey areal Science Tekno Park, survey calon areal Rehab DAS.	1.171.185.900,00	Kabid PDAS RHL
v	Perbenihan Tanaman Hutan				63.800.000,00	
32	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	100	Melaksanakan Konsultasi, koordinasi, Pembinaan dan/atau Pengawasan, Monev dan koordinasi dengan penangkar benih dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	63.800.000,00	Kabid PDAS RHL
iv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				1.206.825.500,00	Kabid Linhut KSDAE
30	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha)	100	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.411.500,00	Kabid Linhut KSDAE

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	100	Koordinasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Operasionalisasi pencegahan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan / pengamanan hutan tingkat tapak oleh UPTD KPHMelakukan Penyuluhan/ Penyadartahuan/ Monitoring pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	1.106.414.000,00	Kabid Linhut KSDAE
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					71.500.000,00	Kabid Linhut KSDAE
i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam				71.500.000,00	Kabid Linhut KSDAE
33	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (kelompok)	100	Melaksanakan Sosialisasi konflik Manusia dan Satwa Liar dan Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	71.500.000,00	Kabid Linhut KSDAE

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					436.681.400,00	Kabid PPM
i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				436.681.400,00	Kabid PPM
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	100	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30.547.000,00	Kabid PPM
35	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	100	Melakukan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tingkat Tapak UPTD KPH, Penilaian Kelas Kelompok Tani hutan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Pemberian bantuan alat ekonomi, produktif ke KTH, dan monitoring program prioritas pembangunan kehutanan	296.134.400,00	Kabid PPM
36	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (ha)	100	Melaksanakan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dan Melakukan	110.000.000,00	Kabid PPM

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target(%)	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1		2	3	4	5	6
				penyiapan dan pengembangan hutan hak		
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					40.000.000,00	Kabid PDAS RHL
i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				40.000.000,00	Kabid PDAS RHL
37	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS (lokasi)	100	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	40.000.000,00	Kabid PDAS RHL
	Jumlah : 5 Program, 16 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan				58.503.146.664,00	

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 tergambar dalam dokumen perjanjian kinerja yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun serta dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang telah disesuaikan pada tahun yang bersangkutan. Melalui perjanjian kinerja diharapkan dapat mewujudkan komitmen komitmen yang tercermin dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja selama satu tahun.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026 sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1. Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya	Rp. 73.795.118.040,-
2	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	36 Lokasi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	10,51%
3	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 Hektar
		5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14%
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	140 Kelompok
5	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

Perjanjian kinerja ini dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada program-program bidang kehutanan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kayu dan penerimaan negara dari subsektor kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penurunan kerusakan kawasan hutan, penurunan luas kebakaran hutan, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan. Perjanjian kinerja dan target Dinas Kehutanan dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari Kepala Dinas ke Sekretaris / Kepala Bidang / Kepala UPTD / Fungsional Madya ke Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Fungsional Muda ke pelaksana / Fungsional Pertama (individu).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dan capaian dengan tahun sebelumnya dan target yang ingin dicapai pada periode akhir RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja yang diukur dalam LKjIP adalah capaian kinerja indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan. Namun capaian kinerja sasaran strategis dipengaruhi pula oleh capaian kinerja kegiatan, oleh sebab itu maka pengukuran kinerja kegiatan merupakan salah satu bagian dari proses penghimpunan data dalam pengukuran kinerja sasaran strategis. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcomes (hasil).

Evaluasi kinerja merupakan salah satu bahan masukan dalam perencanaan kinerja periode yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kinerja sasaran, program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 dengan target, membandingkan dengan kinerja dengan tahun sebelumnya, membandingkan dengan target periode akhir dan membandingkan dengan kinerja pemerintah pusat (KLHK).

Tabel 7. Skala nilai peringkat kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat diketahui dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rupiah)	73.795.118.040	90.230.748.857,11	122,3	Sangat Tinggi
2	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	36	171	475,00	Sangat Tinggi
		3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	10,51	37	349,67	Sangat Tinggi
3	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan	10	130	1300,80	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
			Penanaman (Ha)				
		5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,22	157,14	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	165	117,86	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,45	95,45	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja Dinas Kehutanan selama 1 (satu) tahun kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan kategori sangat tinggi. Penjelasan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan merupakan PNBP merupakan pungutan yang dibayarkan oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan. Data yang tersedia saat ini sampai dengan bulan November 2024.
2. Patroli pengamanan hutan dilakukan pada Kawasan hutan yang rawan terjadinya gangguan baik tanah mineral, tanah gambut maupun di lahan bervegetasi mangrove.
3. Pencegahan karhutlah melalui sosialisasi dan kampanye serta patroli yang diutamakan kawasan hutan pada desa-desa hutan rawan kebakaran.
4. Kegiatan penanaman pada acara-acara peringatan seperti hari lingkungan hidup dan lainnya
5. Luas penanaman di dalam kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan atau dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS Musi.

6. Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial oleh penyuluh melalui berbagai sumberdana diantaranya APBD, APBN dan NGO.
7. Kegiatan pada Layanan kinerja perangkat daerah untuk memenuhi operasionalisasi kantor Dinas dan UPTD KPH.



Gambar 2. Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Prov. Sumsel Tahun 2024

Faktor pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sangat tinggi, sebagai berikut :

IKU 1. Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya (Rupiah)

Faktor pendukung :

- a. Adanya penambahan jumlah PPKH yang mempunyai kewajiban pembayaran PNBPN-PKH pada tahun anggaran berjalan;
- b. Adanya pembayaran PNBPN-PKH terutang tahun sebelumnya;
- c. Adanya pembayaran Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH);
- d. Adanya Pembayaran Pengakuan Hak Atas Tanah (PHAT) dan Pembayaran Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) atas penyelesaian sawit terbangun di Kawasan hutan.

Faktor penghambat :

- a. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang berkompetensi dalam pengelolaan kawasan hutan terutama pada Perizinan Perhutanan Sosial (PS) terbatas;
- b. Pemanenan kayu pada PBPH terkendala faktor alam seperti curah hujan yang tinggi berpengaruh terhadap produksi kayu.

IKU 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri
Maupun Terpadu (Lokasi)

Faktor pendukung :

- a. Arahan dari Pimpinan untuk memenuhi target perencanaan dalam melaksanakan kegiatan dan kinerja SDM.
- b. Hasil patroli menjadi acuan penyusunan rencana tindak lanjut sehingga kinerja pengamanan lebih efektif.
- c. Adanya sosialisasi dan penyadartahuan perundang-undangan pengelolaan hutan kepada kelompok tani hutan yang telah mendapat persetujuan Perhutanan Sosial dan terhadap masyarakat yang telah terlanjur mengelola Kawasan hutan.
- d. Konsolidasi dan koordinasi petugas pengamanan (Polisi Kehutanan) yang baik dengan UPT Kemenhut Gakum dan Kepolisian.
- e. Menetapkan rencana kerja pengamanan hutan yang jelas dan terukur (Target Lokasi, Jadwal Patroli, Tahapan, dan dokumen)
- f. Melaksanakan monev secara berjenjang dan berkesinambungan
- g. Penggunaan drone dalam pelaksanaan patroli pengamanan sehingga lebih efektif.

Faktor penghambat / permasalahan:

- a. Kendaraan operasional dan sarpras baik Dinas dan KPH kurang memadai, sementara akses lokasi / kawasan hutan sulit dijangkau.
- b. Span of control 1 petugas pengamanan hutan terlalu besar sehingga kegiatan pengamanan belum maksimal. Jumlah Polhut (21 orang) dan Petugas Pengamanan Hutan (61 orang) sangat minim untuk menjangkau kawasan hutan (HL, HP, HPK) seluas 2.667.074 ha.

IKU 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Faktor pendukung :

- a. Tersedianya SDM Brigdalkarhutla pada 14 UPTD sehingga lebih cepat menjangkau Lokasi kebakaran hutan/hotspot.
- b. Adanya arahan pimpinan untuk memenuhi target perencanaan dalam melaksanakan kegiatan dan kinerja SDM.
- c. Adanya monev kegiatan pencegahan karhut setiap bulannya.

d. Materi sosialisasi pencegahan karhutla menjadi salah satu agenda yang wajib disampaikan pada setiap adanya kegiatan pembinaan kepada Masyarakat baik kegiatan Dinas, UPT Kemenhut atau Swasta.

e. Koordinasi yang baik antara bidang Perlindungan dan KSDAE dengan UPTD

Faktor penghambat :

- a. Kondisi alam dan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan kurang memadai
- b. Lokasi kegiatan yang sulit diakses dan bervariasi seperti daerah perairan membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi
- c. Jumlah Personil yang memahami teknik mengoperasikan aplikasi, memantau daerah rawan kebakaran dan memantau titik api terbatas.
- d. Media sosialisasi dan penyuluhan guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan terbatas.

IKU 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

Faktor pendukung :

- a. Adanya program penanaman melalui sumber dana APBD dan APBN serta Dana Transfer Daerah (DBH Perkebunan Sawit) sebagai kompensasi kerusakan lahan Kawasan hutan akibat sawit terbangun dalam Kawasan hutan.
- b. Jenis bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat adalah bibit yang berkualitas dan hasil okulasi sesuai permintaan Masyarakat.
- c. Adanya target Kinerja Dinas Kehutanan baik bidang maupun UPTD yang harus dicapai,
- d. Adanya Dokumen RTnRL sebagai panduan untuk menentukan lokasi prioritas untuk dilakukan penanaman/rehabilitasi.
- e. Adanya peran Dinas Kehutanan dan UPTD yang selalu aktif melakukan sosialisasi dan kampanye menanam lahan kritis,
- f. Adanya Program Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan melalui sumberdana DBH Sawit,

Faktor penghambat :

Perubahan cuaca/musim yang tidak menentu mempengaruhi tingkat keberhasilan penanaman.

IKU 5. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)

Faktor pendukung :

- a. Adanya Kewajiban bagi pemegang PPKH untuk melakukan Rehabilitasi DAS, dan pembinaan dari Kementerian Kehutanan (surat teguran) terkait pemenuhan kewajiban penanaman rehabilitasi DAS oleh pemegang PPKH,
- b. Adanya Program Rehabilitasi melalui sumber dana APBN,
- c. Penanaman bertujuan untuk mitigasi Bencana alam seperti keringnya sumber mata air pada bagian hulu, longsor dan banjir.
- d. Adanya peran Dinas Kehutanan dan UPTD KPH dalam melakukan Patroli pengamanan hutan sehingga diketahui areal-areal yang mengalami kekritisn lahan.
- e. Adanya Program Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan melalaui sumberdana DBH Sawit,
- f. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melestarikan DAS bagian hulu

Faktor penghambat :

Perubahan cuaca/musim yang tidak menentu berpengaruh pada keberhasilan /pelaksanaan kegiatan penanaman

IKU 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

Faktor pendukung :

- a. Dukungan Operasional Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)
- b. Dukungan Fasilitasi dari Pihak NGO
- c. Dukungan Dana Alokasi Khusus untuk bantuan alat ekonomi produktif.

IKU 7. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)

Faktor pendukung :

- a. Pengelolaan keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah melakukan penyusunan, pelaporan, monitoring dengan tertib dan bersinergi dengan BPKAD

- b. Pengelolaan perencanaan melakukan penyusunan rencana, monitoring, pengendalian kegiatan dan program, koordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Bapenda, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenhut.
- c. Pengelola kepegawaian melakukan koordinasi dengan BKD
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan layanan dengan UPTD dan Bidang.
- e. Peningkatan kapasitas melalui diklat administrasi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu hanya dapat dilakukan pada beberapa indikator. Hal ini terkait Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026 yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2024 -2026 memiliki prioritas kinerja yang berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode sebelumnya. Indikator tersebut yaitu Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak, luas rehabilitasi pada lahan kritis dan operasional kantor.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Jumlah PNBPN Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, realisasi 69,91% (rendah) dan capaian 47,37% (sangat rendah). Hal ini disebabkan 2 hal yaitu :

- 1) Pada tahun 2023 terdapat peningkatan PSDH secara signifikan, karena adanya pengenaan denda bagi Perusahaan Perkebunan yang terlanjur menanam sawit di dalam kawasan hutan. Hal ini merupakan penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.
- 2) Data PNBPN baru sampai bulan November 2024.

Realisasi dan Capaian Penanaman lahan kritis di luar Kawasan hutan dibanding tahun sebelumnya sangat tinggi dan Prosentase Kawasan hutan yang direhabilitasi juga sangat tinggi. Hal ini karena adanya Dana Transfer Daerah DBH Perkebunan Sawit sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S.128/PK/2023, alokasi transfer DBH Sawit ke Provinsi Sumatera Selatan TA 2024. Berdasarkan PMK Nomor 91 Tahun 2023, salah satu penggunaan DBH sawit untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan RHL yang dilaksanakan dengan sumberdana tersebut yaitu : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL), Pembangunan

Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan, Pembangunan *gully plug*, Pembangunan Dam Penahan, Pembangunan Sumur resapan, Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2, Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan, dan Pembuatan Dan Pengadaan Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan.

Realisasi dan Capaian Pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah dibandingkan tahun lalu menurun tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya satu sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dapat dilaksanakan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Tahun 2024	Indikator Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024			Tahun 2023			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023		Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)	Meningkatnya penerimaan sub sektor kehutanan (Rupiah)	73.795.118.040	90.230.748.857	122,3	50.000.000.000	129.069.761.521	258,14	69,91	47,37	Sangat Rendah
2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)		36	171	475,00						
3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)		10,51	37	349,67						
4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (%)	10	130	1300,80	5,00	46,00	920,00	282,61	141,30	Sangat Tinggi
5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)		0,14	0,22	157,14	0,17	0,27	158,82	77,78	94,44	Sangat Tinggi
6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)		140	165	117,86						

No.	Indikator Kinerja Tahun 2024	Indikator Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024			Tahun 2023			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023		Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persentase operasionalisasi perkantoran yang terlaksana	100	95,45	95,45	100	100	100	95,45	95,45	Sangat Tinggi
8		Produksi Kayu Sub Sektor kehutanan				6.000.000	11.203.220,45				
9		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)				0,17	0,05				
10		Rasio kawasan lindung terhadap luasan kawasan hutan				0,44	0,47				
11		Luasan penyelesaian konflik/permasalahan lahan dan pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan				12.350	21.593,22				
12		Penurunan luas kebakaran hutan				5.984,6	1.678,02				
13		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial				5	83,33				

No.	Indikator Kinerja Tahun 2024	Indikator Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024			Tahun 2023			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023		Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
14		Jumlah peta tematik yang KSP				1	1				
15		Penurunan jumlah hotspot di kawasan hutan				389	4661				
16		Jumlah kasus yang tertangani				3	7				

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Periode Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kehutanan selama periode Renstra ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahun dalam dokumen perencanaan. Target kinerja yang ditetapkan setiap tahun merupakan parameter keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam 3 tahun periode Renstra, sehingga dapat menjadi acuan dalam penetapan target kinerja pada periode Renstra yang akan datang. Perbandingan akan dilakukan pada akhir tahun 2024.

Tabel 10. Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Capaian (%)	Kriteria
1	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rupiah)	90.230.748.857	81.359.117.148	110,90	Sangat Tinggi
2	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	171	82	208,54	Sangat Tinggi
3	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	37	15,76	233,19	Sangat Tinggi
4	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	130	20	650,40	Sangat Tinggi
5	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,22	0,14	157,14	Sangat Tinggi
6	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	165	200	82,50	Sangat Tinggi
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	95,45	100	95,45	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas, menunjukkan seluruh indikator telah melampaui target akhir periode. Sifat dari indikator kinerja Dinas Kehutanan merupakan rutinitas dan berulang setiap tahun seperti IKU1, IKU 2, IKU3, IKU 6 dan IKU 7. Sementara IKU 4 dan IKU 5 bersifat kumulatif sehingga target kinerja ini perlu dilakukan evaluasi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Merujuk pada Berita Acara Koordinasi teknis Perencanaan Bidang Kehutanan Tahun 2024 antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh realisasi sebagai berikut :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tingkat Nasional Tahun 2023

No.	Outcome Prioritas	Indikator Outcome Prioritas	Satuan	Tahun 2023				Realisasi Prov terhadap Target Prov	Realisasi Prov terhadap Realisasi Nasional
				Nasional		Provinsi Sumatera Selatan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kemandirian usaha KUPS	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah/ Kapita	n/a	1.184.646.111.078	n/a	41.710.000.000	n/a	3,52
2	Peningkatan kemandirian usaha KTH	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah/ Kapita	n/a	723.300.034.339	n/a	2.310.000.000	n/a	0,32
3	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan	Ha	1.172.000	776.085	5.000	2.204	44,08	0,28
4	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	200.000	n/a	1.263	145	11,48	n/a
5	Rehabilitasi hutan mangrove	Luas hutan mangrove yang	Ha	n/a	n/a	n/a	7	n/a	n/a

Nilai transaksi ekonomi Kelompok Perhutanan Sosial Sumatera Selatan terhadap perolehan transaksi secara Nasional sebesar 3,52% hal ini berarti Kelompok Perhutanan Sosial yang mana merupakan masyarakat yang diberikan akses legal untuk mengelola hutan telah berkontribusi sebesar 3,52% dari Nilai transaksi Ekonomi secara Nasional. Sedangkan NTE KTH hanya mencapai 0,32% dibandingkan Perhutanan Sosial cukup rendah, sehingga pembinaan terhadap KTH perlu ditingkatkan.

Untuk luas akses legal yang telah diberikan kepada masyarakat hanya 44,08% dari target yang disepakati. Pada tahun 2023 hanya 4 (empat) persetujuan Perhutanan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri KLHK. Realisasi Sumsel seluas 0,28% dari realisasi secara Nasional.

Rehabilitasi hutan merupakan kewenangan Pusat. Pada Tahun 2023, luas hutan yang direhabilitasi terhadap target yang disepakati hanya sebesar 11,48% hal ini terkait dengan alokasi dana rehabilitasi hutan yang tidak sesuai dengan target luasan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Seluruh Indikator kinerja mencapai keberhasilan (sangat tinggi), namun masih terdapat faktor penghambat sehingga pencapaian tersebut masih dapat ditingkat apabila didukung oleh upaya yang tepat. Berikut analisis pencapaian kinerja agar lebih optimal.

Tabel 12. Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1 Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rupiah)	73.795.118.040	90.230.748.857,11	122,3	Sangat Tinggi	Keberhasilan IKU 1 Didukung oleh ketersediaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang berkompetensi dalam pengelolaan kawasan hutan terutama pada Perizinan Perhutanan Sosial (PS) terbatas;	Mengajukan diklat kompetensi pengelola persetujuan perhutanan sosial kepada UPT Kemenhut Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah V
2	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	36	171	475,00	Sangat Tinggi	Span of control 1 petugas pengamanan hutan terlalu besar sehingga kegiatan pengamanan belum maksimal.	1. Konsolidasi dan koordinasi petugas pengamanan (Polisi Kehutanan) yang baik dengan UPT Kemenhut Gakum dan Kepolisian. 2. Menetapkan rencana kerja pengamanan hutan yang jelas dan terukur (Target Lokasi, Jadwal Patroli, Tahapan, dan dokumen) 3. Melaksanakan monev secara berjenjang dan berkesinambungan
		3 Persentase Luas Kawasan Hutan yang	10,51	37	349,67	Sangat Tinggi	a. Kondisi alam dan sarana prasarana pencegahan dan	1. Melakukan kerjasama dengan pihak Swasta dalam pencegahan dan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)					pengendalian kebakaran hutan kurang memadai b. Lokasi kegiatan yang sulit diakses dan bervariasi seperti perairan membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi c. Jumlah Personil yang memahami teknik mengoperasikan aplikasi, memantau daerah rawan kebakaran dan memantau titik api terbatas	pengendalian kebakaran hutan. 2.melakukan diklat dan simulasi pengendalian kebakaran hutan bagi petugas dalkar.
3	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4 Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	130	1300,80	Sangat Tinggi	Perubahan cuaca/musim yang tidak menentu mempengaruhi tingkat keberhasilan penanaman.	Menyusun jadwal persiapan dan pelaksanaan penanaman sesuai dengan musim.
		5 Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,22	157,14	Sangat Tinggi		
4	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6 Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	165	117,86	Sangat Tinggi	a. Dukungan Operasional Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) b. Dukungan Fasilitas dari Pihak NGO	Mencari sumber pendanaan lain yang sah tidak mengikat untuk pembinaan Kelompok Perhutanan Sosial dan melakukan kerjasama dengan Swasta/NGO

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
5	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,45	95,45	Sangat Tinggi	Belum ada formasi diklat untuk pegawai dishut	Berkoordinasi dengan Lembaga diklat (Pemprov /Kemenhut)

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan capaian kinerja. Sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD menjadi kekuatan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Sumber daya dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya berupa dana yang cukup akan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan oleh setiap OPD. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2024 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		52.326.864.564,00	49.910.332.068,00	95,38
	i	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.000.000,00	225.627.108,00	99,84
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.852.706,00	99,85
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.000.000,00	125.774.402,00	99,82
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.931.561.564,00	43.746.943.727	95,24
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.638.736.364	43.454.974.404	95,22
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.280.000,00	223.280.000,00	100,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	69.545.200,00	68.689.323,00	98,77
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.000.000,00	41.910.700,00	99,79

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.000.000,00	41.910.700,00	99,79
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.000.000,00	31.793.700,00	72,26
	7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.000.000,00	31.793.700,00	99,36
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.318.000.000,00	1.300.750.009	98,69
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.000.000,00	38.762.339,00	99,39
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.800.837,00	99,60
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.000.000,00	139.585.287,00	99,70
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	45.461.307,00	87,43
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	5.940.000,00	49,50
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.000.000,00	81.830.000,00	96,27
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.000.000,00	927.520.239,00	98,67
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.080.032.000,00	3.940.877.386	96,59
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	11.642.900,00	77,62
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.732.000,00	509.934.486,00	78,97
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.419.300.000,00	3.419.300.000,00	99,80
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	660.271.000,00	597.429.438,00	90,48

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	567.000.000,00	514.184.438,00	90,69
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.271.000,00	83.245.000,00	89,25
	21	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0,00	0,00	0,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		5.628.100.700,00	4.060.434.590	72,15
	i	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	43.000.000,00	41.940.193,00	97,54
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	43.000.000,00	41.940.193,00	97,54
	ii	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	184.975.000,00	184.103.277,00	99,53
	23	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	94.950.000,00	94.192.064,00	99,20
	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	90.025.000,00	89.911.213,00	99,87
	iii	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.129.500.200,00	2.579.644.261	62,47
	25	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	265.200.000,00	182.019.303,00	68,63
	26	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar	1.753.711.300,00	1.380.241.511,00	78,70

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Kawasan Hutan Negara			
	27	Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	539.736.000,00	44.869.550,00	8,31
	28	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	399.667.000,00	0,00	0,00
	29	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.171.185.900,00	972.513.897,00	83,04
	iv	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.206.825.500,00	1.200.044.270	99,44
	30	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	100.411.500,00	100.030.265,00	99,62
	31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu- langan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.106.414.000,00	1.100.014.005,00	99,42
	v	Perbenihan Tanaman Hutan	63.800.000,00	54.702.589,00	85,74
	32	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	63.800.000,00	54.702.589,00	85,74
III	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		71.500.000,00	70.212.528,00	98,20
	i	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	71.500.000,00	70.212.528,00	98,20
	33	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	71.500.000,00	70.212.528,00	98,20
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN		436.681.400,00	418.775.777,00	95,90

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	i	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	446.811.400,00	418.775.777,00	95,90
	34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30.547.000,00	30.478.441,00	99,78
	35	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	296.134.400,00	279.249.148,00	94,30
	36	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	110.000.000,00	109.048.188,00	99,13
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		40.000.000,00	38.101.577,00	95,25
	i	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	38.101.577,00	95,25
	37	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	40.000.000,00	38.101.577,00	95,25
		Jumlah : 5 Program, 15 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan	58.503.146.664	54.497.856.540	93,15

Alokasi anggaran Dinas Kehutanan sebesar Rp.58.503.146.664,-. pada Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp 54.497.856.540,00 (93,15%). Secara keseluruhan telah penyerapan anggaran mencapai lebih dari 90%.

Capaian sub kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 70% dan alasannya yaitu :

1. Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik meminimalisir penggunaan kertas sehingga sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat menjadi lebih efisien.

2. Target kinerja Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL dan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara telah tercapai sehingga sub kegiatan ini penggunaan dananya efisien. Sedangkan sub kegiatan Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan karena terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan baru tahap perencanaan bangunan. Sebagaimana disampaikan pada awal laporan, sumberdana kegiatan ini adalah DBH Perkebunan Sawit. Kegiatan tersebut dapat dijalankan setelah adanya pembahasan Rencana Kegiatan dan Penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan pada bulan Juni 2024.
3. Sub kegiatan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya, karena berdasarkan KepmenLHK No. 1140 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024, penggunaan DBH Sawit untuk diluar kawasan hutan. Sementara rencana Lokasi dalam Dokumen Rencana Kegiatan dan Penganggaran Sumber Dana DBH Sawit di dalam kawasan hutan.

Pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran menggunakan rumus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/Pmk.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Pengukuran Efisiensi Dilakukan Dengan Membandingkan Penjumlahan Dari Selisih Antara Perkalian Pagu Anggaran Keluaran Dengan Capaian Keluaran Dan Realisasi Anggaran Keluaran Dengan Penjumlahan Dari Perkalian Pagu Anggaran Keluaran Dengan Capaian Keluaran. Perhitungan efisien. Tingkat Efisiensinya dikategorikan sebagai berikut :

Nilai Efisiensi > 70%	:	Sangat Efisien
Nilai Efisiensi 70 % - 60 %:		Efisien
Nilai Efisiensi 60 % - 50% :		Cukup Efisien
Nulai Efisiensi <50%	:	Kurang Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap indikator kinerja sebagaimana tabel berikut, sedangkan perhitungan efisiensi sebagaimana pada lampiran.

Secara keseluruhan Nilai efisiensi Dinas kehutanan sebanyak 5 Program, 15 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan adalah 67,125 (Efisien) dengan rincian : Program Pengelolaan Hutan sangat efisien; Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya cukup efisien dan 3 program lainnya efisien.

Pada Level kegiatan dan sub kegiatan nilai efisiensi lebih dari 50 % atau cukup efisien sampai sangat efisien. Hal ini menunjukkan Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada baik pendanaan, sarana dan prasarana maupun SDM.

Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya peraturan baru yang mengatur kewenangan Pusat-Daerah, efisien dana, dan kondisi lainnya yaitu :

- (1) Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- (2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (3) Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tabel 14. Perbandingan Capaian Program/Kegiatan/sub Kegiatan terhadap Capaian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4,62	61,55	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	0,16	50,41	Cukup Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,15	50,37	Cukup Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,18	50,45	Cukup Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	4,76	61,89	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,78	61,95	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	50	Cukup Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,23	53,08	Cukup Efisien
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	0,21	50,53	Cukup Efisien
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,21	50,53	Cukup Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	27,74	119,35	Sangat Efisien
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,64	51,61	Cukup Efisien
Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat pegawai	0,00	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1,31	53,27	Cukup Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,61	51,52	Cukup Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,40	50,99	Cukup Efisien
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,30	50,74	Cukup Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,57	81,44	Sangat Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50,50	176,25	Sangat Efisien
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,73	59,32	Cukup Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,33	53,33	Cukup Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	0,00	50	Cukup Efisien
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	50	Cukup Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	3,41	58,53	Cukup Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,38	105,95	Sangat Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21,03	102,58	Sangat Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,20	50,5	Cukup Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	9,52	73,79	Sangat Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9,31	73,29	Sangat Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,75	76,87	Sangat Efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Sangat Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	27,85	119,64	Sangat Efisien
Pengelolaan Rencana tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	2,46	56,16	Cukup Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2,46	56,16	Cukup Efisien
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	0,47	51,18	Cukup Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 Satu) Provinsi Secara Berkala	0,80	51,99	Cukup Efisien
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0,13	50,32	Cukup Efisien
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	37,53	143,83	Sangat Efisien
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RTnRL	31,37	128,43	Sangat Efisien
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	21,30	103,24	Sangat Efisien
Penerapan Teknis Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	91,69	279,22	Sangat Efisien
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas teknologi rehabilitasi yang diterapkan	0	0	0
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16,96	92,4	Sangat Efisien
Perbenihan Tanaman Hutan		14,26	85,65	Sangat Efisien
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	14,26	85,65	Sangat Efisien
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	0,56	51,40477	Cukup Efisien
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0,38	50,949182	Cukup Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	0,58	51,446112	Cukup Efisien
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	1,80	54,50165	Cukup Efisien
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	1,80	54,50165	Cukup Efisien
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1,80	54,50165	Cukup Efisien
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	4,10	60,25097	Efisien
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	4,10	60,25097	Efisien
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0,22	50,561094	Cukup Efisien
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5,70	64,25472	Efisien
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	0,87	52,163209	Cukup Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	4,75	61,86514	Efisien
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	4,75	61,86514	Efisien
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4,75	61,865144	Efisien

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Efisiensi		
		Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Kategori
	Jumlah : 5 Program, 15 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan	6,85	67,125	Efisien

D. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja setiap indikator kinerja utama yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Pada tabel berikut, program dan kegiatan/sub kegiatan dianalisis apakah menunjang keberhasilan dari indikator kinerja.

Capaian Program Pengelolaan Hutan, Kegiatan dan Sub kegiatan rata-rata mencapai 100% menunjang keberhasilan kinerja 5 (lima) indikator yaitu Jumlah Pembayaran PNBPN sesuai kewajibannya, Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove, Persentase Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla, Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman, serta Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan capaian 100%. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan indikator kinerja yaitu (1) Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan sehingga Bangunan Sipil Teknis yang belum Terbangun. (2) Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak tercapai.

Capaian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi berfokus pada kegiatan konservasi pada areal penyanggah hal ini menunjang keberhasilan kinerja Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove.

Capaian Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / Kegiatan/Sub Kegiatan nya menunjang 2 (dua) indikator yaitu Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman, dan Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi. Program ini bertujuan untuk mengoptimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

melalui Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS kepada pengelola DAS seperti UPTD KPH, Dinas Lingkungan Hidup dan Forum DAS.

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 sub kegiatan mendukung indikator Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan. Output yang dihasilkan yaitu peningkatan kapasitas penyuluh, KTH yang didampingi dan penyiapan Kawasan hutan untuk areal perhutanan sosial.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menunjang Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak tercapai karena adanya efisiensi APBD. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak tercapai sehingga capai Program tidak maksimal (95,45%).

Tabel 15. Analisis Kegagalan dan Keberhasilan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	1.	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)	73.795.118.040	90.230.748.857,11	122,3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	100	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
							Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	100	Menunjang
II	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi)	36	171	475,00	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha)	187,95	Menunjang
							PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
							Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
							Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (kelompok)	100	Menunjang
		3.	Persentase Luas Kawasan Hutan	10,51	37	349,67	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Laporan)	100	Menunjang
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	4.	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Hektar)	10	130	1.300,80	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
							Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	100	Menunjang
							Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha)	107,45	Menunjang
							Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Tidak Menunjang
							Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	Tidak Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	100	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Perbenihan Tanaman Hutan			
							Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	100	Menunjang
							PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
							Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS (lokasi)	100	Menunjang
		5.	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,22	157,14	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
							Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	100	Menunjang
							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	100	Menunjang
IV	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	6.	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan	140	165	117,86	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
							Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	-	Tidak Menunjang
							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Melakukan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Tingkat Tapak UPTD KPH, Penilaian Kelas Kelompok Tani hutan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Pemberian bantuan alat ekonomi, produktif ke KTH, dan monitoring program prioritas pembangunan kehutanan	219,05	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan	Melaksanakan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dan Melakukan penyiapan dan pengembangan hutan hak	101,63	Menunjang
V	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,45	95,45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU dan melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan	100	Menunjang
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan UPTD serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyiapkan pembayaran honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengada barang dan jasa	100	Menunjang
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Melaksanakan pengamanan BMD	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Diklat Teknis atau Administrasi	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor/bangunan Dinas dan UPTD	100	Menunjang
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Menunjang
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan UPTD	100	Menunjang
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas dan UPTD	100	Menunjang

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan /surat kabar/majalah/ tabloid	100	Menunjang
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menyiapkan konsumsi atas kunjungan tamu dan rapat Dinas Kehutanan dan UPTD	100	Menunjang
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan konsultasi/rapat pembangunan kehutanan pada tingkat Dinas dan UPTD	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di Dinas dan UPTD	100	Menunjang
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas dan UPTD	100	Menunjang
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga malam, Tenaga Pendamping Petuas Teknis Kehutanan, Tenaga administrasi dan Tenaga operator komputer, dan instruktur senam.	100	Menunjang
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capai-an (%)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Capai-an (%)	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, asuransi, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Menunjang
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Menyediakan pemasangan dan pemeliharaan absensi kepegawaian, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas dan UPTD.	100	Menunjang
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	Tidak Menunjang

Seluruh program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai rata-rata 100% yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kelima program tersebut tidak menemui kendala teknis dalam pelaksanaannya selama tahun 2024.

Pada tahun 2024 terdapat sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan maksimal dan atau sub kegiatan yang alokasi dananya kurang memadai namun sangat menunjang untuk pencapaian kinerja yaitu :

1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
2. Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan

E. Analisis Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu Kebijakan Nasional dalam pembangunan Indonesia. PUG diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. PUG dalam pembangunan kehutanan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah.

Proporsi gender di Dinas Kehutanan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pegawai laki-laki 282 orang (67,46%) dan pegawai perempuan 136 orang (32,54%). Penyelenggaraan PUG di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan *Focal Point* yang beranggotakan 17 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. *Focal point* bertugas untuk mempromosikan PUG di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Selatan dan UPTD KPH, menyusun rencana kerja dan pengarusutamaan gender serta mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka Perencanaan dan Penganggaran, Dinas Kehutanan telah menyusun *Gender Action Budget* (GAB)/KAK Responsif Gender Tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3. Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara
4. Penetapan Pengadaan Benih dan/ atau Bibit Terdaftar
5. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender pada Dinas Kehutanan telah mengintegrasikan kegiatan pembangunan kehutanan dengan pelibatan perempuan kurang lebih 42%, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender pada Dinas Kehutanan Tahun 2024

Subkegiatan/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			
a. Kegiatan sosialisasi konflik manusia dan satwa liar	Dusun Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis	75	25
	Desa Tanjung Agung Kec. Semendo Darat Ulu Kab. Muara Enim, UPTD Wilayah VIII Semendo	55	45
b. Kegiatan koordinasi menyusun rencana mitigasi interaksi negative manusia dan gajah	Desa SP V Tri Anggunjaya SP 5 HTI, Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, UPTD KPH Wilayah XII Benakat	80	20

Subkegiatan/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
a. Kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan	UPTD KPH Wilayah VII Semendo, Kab. Muara Enim	80	20
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			
a. Kegiatan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Desa Cinta Jaya Kab. OKI Desa Bangun Sari, Desa Karang Anyarm Desa Muara Telang, Desa Sungai Pinang, Desa Teluk Payo Kab. Banyuasin	50	50
b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	PT. SBB, PT. MHP, PT. REKI, PT. KEN, PT. SBA, PT. BAP, PT. BH, WLMS, PT. CBS, PT. BSS, PT. RHS.	50	50
c. Kegiatan pengecekan hotspot	PT. Paramitra Mulia Langgeng (PBPH)	50	50
4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
a. Bimtek PUG, Bimtek, Penyuluh Kehutanan, Monitoring dan Evaluasi Penyuluh Kehutanan	Palembang, Wilayah Kerja UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti Martapura, UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji	50	50
5. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KTH			
a. Pengawasan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Penyerahan Mesin Pemipil jagung dan Penepung Jagung, Monitoring dan Evaluasi KTH	Desa Muara Burnai II, KTH Medak Lestari Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Wilayah VII Mekakau Saka, Desa Sukarami Kab. OKUS, UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding	55	45

Subkegiatan/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
6. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			
Fasilitasi Penanganan Konflik pada IUPHHK- HTR Gapoktanhut Karya Sialang Makmur pada Pengecekan Lapangan Potensi Calon Lokasi Hutan Rakyat, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan PS di UPTD KPH	UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji, Kel. Karya Jaya Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur, Riding, Kab. OKI, UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji, Kota Prabumulih, Wilayah VIII Semendo, Kab. Muara Enim	57	43

Kegiatan Responsif Gender yang dilaksanakan oleh UPTD KPH keterlibatan Perempuan berfokus pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi lahan. Pelibatan Perempuan rata-rata mencapai 62%. Beberapa UPTD telah membentuk/memfasilitasi kelompok tani (KUPS) Perempuan yaitu KPH V dan KPH XI, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17. Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender pada UPTD KPH Tahun 2024

UPTD KPH/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
1. UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis bekerja sama dengan ICRAF dalam proyek <i>Land For Life</i> a. Kegiatan pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan (terutama perempuan dan anak-anak) baik didalam dan disekitar kawasan hutan b. Pembibitan tanaman berbasis pepohonan (buah buahan seperti duren, alpukat, lengkeng, mangga) dan dilakukan pelatihan perbanyakan tanaman secara vegetatif untuk menghasilkan tanaman unggul (cangkok, stek, okulasi, sambung) c. Kebun dapur komunal (untuk belajar bagaimana membuat dan mengelola kebun dapur, biasanya tanaman sayuran, yang harapannya bisa memenuhi kebutuhan dapur)	Desa Mangsang, Kepayang, Suka Damai, Mendis Jaya, Muara Medak dan desa Muara Merang	60	40
2. UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji a. Pembentukan KUPS Sejahtera Bunda, KTH Jaya Makmur. dengan komoditi singkong (pangan agroforestri). KUPS ini beranggotakan 18 perempuan yang membuat produk olahan siap jual yaitu Tiwul.	Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir	-	100

UPTD KPH/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
b. KUPS Sejahtera Bunda telah mendapatkan pelatihan yang difasilitasi oleh Mahasiswa yang mengikuti program Magang Bersertifikat (MSIB), pelatihan berupa cara pengemasan produk, dan penjualan tiwul secara online (marketplace)			
3. UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti a. Keikutsertaan ibu-ibu PKK dalam kegiatan seremonial penanaman pada hari menanam Pohon Indonesia.	Desa Batumarta X, Kabupaten OKUT	65	35
4. UPTD KPH VIII Semendo a. Mengikuti kegiatan peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Pengarusutamaan Gender)	Wilayah KPH Wilayah VIII Semendo	45	55
5. UPTD KPH Wilayah X Dempo Pelatihan pembuatan pakan ternak (magot)	Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa tepatnya di rumah Ketua KUPS Agro Pasai	42	58
6. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah a. Pengembangan kegiatan ekonomi produktif seperti pengolahan HHBK dan jasa lingkungan dan Pelatihan GAP (Good Agriculture Practices) budidaya kopi bagi 40% perempuan anggota KPS lokasi Lahat b. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Dalam Kelola HKM c. Pembentukan KUPS Perempuan	Kab. Lahat KPS Ayek Bahu, Tanjung Sakti PUMA, Pulau Panas, Lahat Desa pulau Panas Kecamatan Tanjung	60 38	40 62 100

UPTD KPH/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Persentase Keikutsertaan Laki-Laki Dan Perempuan	
		Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
1	2	3	4
KUPS Tanjung Seganti dengan jumlah anggota 19 orang perempuan lokasi	Sakti PUMI Kabupaten Lahat.		



Gambar 5. Pelibatan Perempuan dalam kegiatan pembangunan kehutanan

F. Data Dukung Pencapaian Kinerja

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel dan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dapat dicapai dengan jumlah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai kewajibannya dapat dicapai dengan didukung oleh program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Hutan, dengan kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi

1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan pagu sebesar Rp. 43.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 97,54% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung,

2.1 Sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar Rp. 94.950.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,20% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2 Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi pagu sebesar Rp. 90.025.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,87% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Total pagu untuk mendukung sasaran 1 sebesar Rp. 227.975.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 226.043.470,- atau 99,15%. Adapun capaian kinerja indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

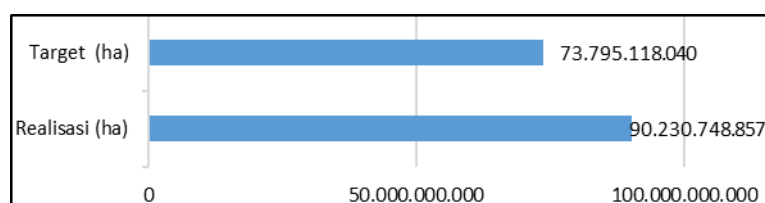
Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 1

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBPs sesuai kewajibannya (Rupiah)	73.795.118.040	90.230.748.857	122,27

Sumber Data : Renstra Dishut Tahun 2024-2026

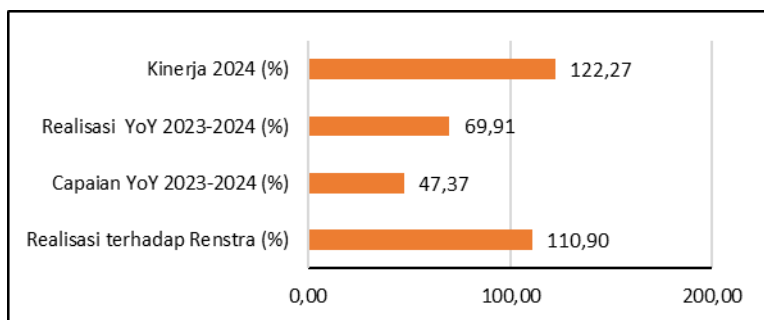
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya produktivitas kawasan hutan dengan indikator jumlah pembayaran PNBPs sesuai kewajibannya telah melebihi target indikator tahun 2024.

IKU 1. Jumlah Pembayaran PNBPs sesuai kewajibannya (Rupiah)



Target PNBPs diperoleh dari hasil kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan pada akhir tahun lalu, dengan

mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan. Besaran PNBPs oleh Pemegang PBPH, Persetujuan Perhutanan Sosial, dan wajib bayar lainnya tahun 2024 melebihi target, hal ini karena adanya pembukaan lahan Kawasan kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan. Capaiannya sebesar 122,27%.



Capaian IKU ini lebih rendah dari tahun 2023, terhadap realisasi sebesar 69,91% dan capaian sebesar 47,37%. Data tahun 2024 baru mencapai bulan November dan tidak ada pembayaran denda dari sawit terbangun sebagaimana

tahun lalu. Terhadap target Renstra, IKU ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 110,90%.

Data Dukung Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rupiah)

IKU tersebut dapat dicapai dengan hasil melebihi target dikarenakan *outcome* yang dicapai melalui Program Pengelolaan Hutan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan maka *outcome* yang ingin dicapai dari sasaran berupa penerimaan sub sektor kehutanan dan luasan produksi Perizinan Berusaha.

Penerimaan sub sektor kehutanan meliputi jumlah pembayaran PNBP sesuai kewajibannya, dimana pembayaran PNBP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Realisasi pembayaran PNBP Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Realisasi PNBP Tahun 2024 (Rp)				TOTAL PNBP (JAN-NOV) TH. 2024 (Rp)
	PSDH	DR	DR	IIUPH	
	(Rp)	(USD)	(Rp)	(Rp)	
Musi Banyuasin	18.680.728.253	98.186	1.597.929.789	626.640.000	20.905.298.042
OKU	408.161.040	0	-	-	408.161.040
Muara Enim	9.621.043.774	46.888	758.449.369	-	10.379.493.143
Lahat	3.871.802.256	155.434	2.433.779.309	-	6.305.581.565
Musi Rawas	3.425.233.839	166.411	2.608.606.663	-	6.033.840.502
OKI	40.846.058.682	-	-	-	40.846.058.682
Palembang	-	-	-	-	-
Prabumulih	-	-	-	-	-
Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
Pagaralam	8.499.382	-	-	-	8.499.382
Banyuasin	2.978.222.396	93.528	1.460.338.422	-	4.438.560.818
OKU Timur	-	-	-	-	-
OKUSelatan	12.807.816	-	-	-	12.807.816
Ogan Ilir	-	-	-	-	-

Kabupaten/Kota	Realisasi PNPB Tahun 2024 (Rp)				TOTAL PNPB (JAN-NOV) TH. 2024
	PSDH	DR	DR	IIUPH	
	(Rp)	(USD)	(Rp)	(Rp)	
Empat Lawang	-	-	-	-	-
Pali	888.282.948	-	-	-	888.282.948
Musi Rawas Utara	3.428.840	47	736.079	-	4.164.919
Jumlah Tahun 2024	80.744.269.226	560.494	8.859.839.631	626.640.000	90.230.748.857

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan, Desember 2024

Realisasi pembayaran PNPB Tahun 2024 diperoleh dari wajib bayar yang melakukan pembayaran PNPB sesuai kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 80.744.269.226 diperoleh dari :
 - 1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), jumlah wajib bayar sebanyak 24 PBPH dengan pembayaran PSDH sebesar Rp. 78.414.684.936;
 - 2) Persetujuan Perhutanan Sosial, jumlah wajib bayar sebanyak 16 Kelompok Perhutanan Sosial dengan jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp. 42.624.832;
 - 3) Penggunaan Kawasan Hutan, jumlah wajib bayar sebanyak 32 pemilik Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan jumlah pembayaran PSDH sebesar Rp. 2.286.959.458.
- b. Dana Reboisasi (DR) sebesar 560.494 USD atau Rp. 8.859.839.631 seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Kawasan Hutan dengan jumlah wajib bayar sebanyak 32 pemilik Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp. 626.640.000 seluruhnya diperoleh dari PBPH dengan jumlah wajib bayar sebanyak 1 PBPH.

Sedangkan realisasi produksi hasil hutan kayu dari hutan tanaman dan hutan alam dengan jumlah volume 10.357.065,16 M³ dan realisasi produksi HHBK sebesar 27.134 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 20. Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2024					
		TANAMAN		ALAM		Total	
		Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3
1	Ogan Komering Ilir	-	5.379.511,00	-	-	-	5.379.511,00
2	Musi Banyuasin	-	2.396.342,28	-	-	-	2.396.342,28
3	Musi Rawas	-	455.590,92	-	-	-	455.590,92
4	Muara Enim	-	1.181.099,76	-	-	-	1.181.099,76

No	Kabupaten/Kota	Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2024					
		TANAMAN		ALAM		Total	
		Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3
5	Banyuasin	-	348.214,58	-	-	-	348.214,58
6	Lahat	-	425.633,47	-	-	-	425.633,47
7	Ogan Komering Ulu	-	48.590,60	-	-	-	48.590,60
8	Penukal Abab Lematang Ilir	-	120.552,39	-	-	-	120.552,39
9	OKU Timur	-	-	-	-	-	-
10	OKU Selatan	-	1.524,74	-	-	-	1.524,74
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-
12	Musi Rawas Utara	-	-	15,00	5,42	15,00	5,42
13	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-
14	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-
15	Kota Pagaralam	-	-	-	-	-	-
16	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-
17	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-
Total		-	10.357.059,74	15,00	5,42	15,00	10.357.065,16

Sumber Data : SIPUHH, Desember 2024

Tabel 21. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi PNBK Tahun 2024 (Rp)			Total Produksi	Total PNBK
		PSDH	DR	IIUPH		
		Rp	USD	Rp	Ton	Rp
1	Ogan Komering Ilir	34.125.450,00	-	-	230,50	34.125.450,00
2	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-
3	Musi Rawas	-	-	-	-	-
4	Muara Enim	-	-	-	-	-
5	Banyuasin	-	-	-	-	-
6	Lahat	-	-	-	-	-
7	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-
8	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-
10	OKU Selatan	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
13	Ogan Ilir	-	-	-	-	-
14	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
15	Kota Pagaralam	8.499.382,00	-	-	26.903	8.499.382,00
16	Kota Palembang	-	-	-	-	-
17	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-
Total		42.624.832	-	-	27.134	42.624.832

Sumber Data : SIPUHH, Desember 2024

Realisasi luasan produksi pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 seluas 43.710,18 Ha. Dimana realisasi luas produksi tersebut hanya sebesar 25,52 % dari Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) pada PBPH tahun 2024 yang seluas 171.278,65 Ha. Rencana luas produksi yang belum terealisasi akan dilakukan *carry over* pada tahun berikutnya.

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar															Realisasi SIPUHH
No.	Provinsi	HHK Tumbuh Alami				HHK Budidaya Tanaman				Total					
		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi			
		Luas	Volume	Luas	Volume	Luas	Volume	Luas	Volume	Luas	Volume	Luas	Volume		
1	Sumatera Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	10.363.887,00	
	SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	10.363.887,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	171.278,65	16.353.403,56	43.710,18	3.849.023,92	10.363.887,00	

Gambar 6. Realisasi luasan produksi PBPH tahun 2024 (Sumber Data : SIPASHUT, 2024)

Pencapaian jumlah luasan produksi dan volume produksi kayu tahun 2024 menunjukkan pemanfaatan hutan di Provinsi Sumatera Selatan kurang optimal, Penyebab atau akar dari permasalahannya antara lain :

- Rendahnya kepatuhan PBPH untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan lahan di areal kerjanya yang menyebabkan realisasi produksi hasil hutan kayu dari pemanfaatan hutan belum optimal
- PBPH belum menerapkan konsep Multi Usaha;
- Pelaksana penatausahaan produksi hasil hutan yang belum sesuai dengan kondisi lapangan;
- Tata cara penyelesaian (permasalahan hutan) belum dapat diterima masyarakat akibat adanya konflik/permasalahan lahan dan permukiman masyarakat dalam kawasan hutan dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara legal.

Fokus utama Program Pengelolaan Hutan dengan melakukan upaya penyelesaian secara teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Muara Enim, yaitu pada PBPH:
 - PT. Bumi Andalas Permai berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - PT. Bumi Mekar Hijau berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir

- 3) PT. SBA Wood Industries berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 4) PT. Ciptamas Bumi Subur berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 5) PT. Paramitra Mulia Langgeng berada di Kabupaten Musi Rawas Utara
- 6) PT. Musi Hutan Persada berada di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas
- 7) PT. Bumi Persada Permai I berada di Kabupaten Musi Banyuasin
- 8) PT. Bumi Persada Permai II berada di Kabupaten Musi Banyuasin
- 9) PT. Rimba Hutani Mas di Kabupaten Musi Banyuasin
- 10) PT. Sumber Hijau Permai di Kabupaten Musi Banyuasin
- 11) PT. Tripupa Jaya di Kabupaten Musi Banyuasin
- 12) PT. Wahana Lestari Makmur Sukses di Kabupaten Musi Banyuasin
- 13) PT. Tiesico Cahaya Pertiwi berada di Kabupaten Musi Banyuasin
- 14) PT. Sentosa Bahagia Bersama di Kabupaten Musi Banyuasin



Gambar 7. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kawasan hutan pada PBPH

- b. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas.



Gambar 8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peredaran Hasil Hutan

2. Pengelolaan Rencana tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kewenangan Provinsi maka *outcome* yang ingin dicapai dari sasaran berupa luas penanganan penyelesaian permasalahan lahan hutan. Secara pelaksanaan anggaran terbagi pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan yang difokuskan dalam melaksanakan pengajuan permohonan percepatan penetapan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pelabuhan New Palembang.

Pengajuan permohonan percepatan penetapan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Permohonan Perpanjangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharuskan menyelesaikan pemenuhan komitmen kewajiban pelepasan kawasan hutan untuk Pelabuhan New Palembang terkait dokumen penyelesaian persetujuan lingkungan yang masih berproses. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyetujui perpanjangan penyelesaian kewajiban komitmen persetujuan pelepasan KH untuk Pelabuhan New Palembang sesuai dengan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Menteri LHK No. S.1230/MenLHKPKTL/PPKH/PLA.2/8/11/2023 tanggal 11 November 2023. Perpanjangan tersebut diberikan untuk jangka waktu sampai 20 Juni 2025.

Dengan demikian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan yang difokuskan dalam melaksanakan pengajuan permohonan percepatan penetapan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pelabuhan New Palembang ke Kementerian LHK.



Gambar 9. Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

Sasaran 2. Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya

Tolak ukur capaian sasaran mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya diselesaikan sebagai berikut :

1. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)
2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Tabel 22. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya	1. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan	36	135	375

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)			
		2. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)	10,51	24	228,4

Sasaran Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya dapat diselesaikan telah mencapai target indikator tahun 2024. Target Rasio Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi), Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%) serta, Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu (Lokasi) telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Hutan

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

1.1 Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan pagu sebesar Rp. 100.411.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,62% dan realisasi fisik sebesar 156,95%.

1.2 Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pagu sebesar Rp. 1.106.414.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 99,42% dan realisasi fisik sebesar 100%.

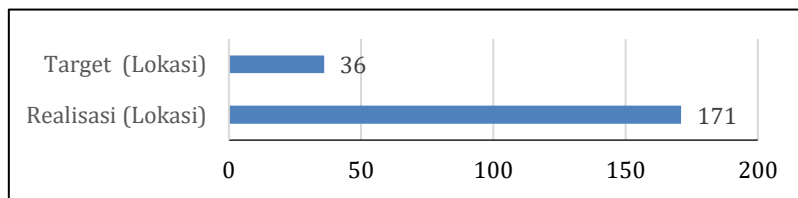
Program Konservasi Sumber Daya Alam

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

1.3 Sub kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi pagu sebesar Rp 71.500.000,- dengan realiasasi keuangan sebesar 98,20% dan realisasi fisik sebesar 100%.

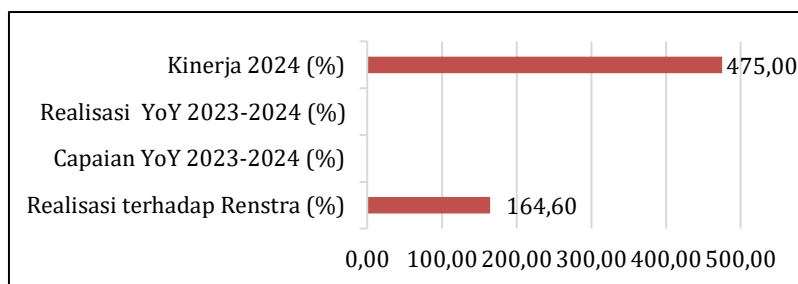
Total pagu untuk mendukung sasaran 2 sebesar Rp.1.278.325.500,- dengan realisasi keuangan Rp.1.270.256.798,- atau 99,37% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

IKU 2. Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)



Target patroli pada awal tahun sebanyak 36 lokasi. Realisasi sampai dengan akhir tahun 135 lokasi, hal ini disebabkan

pendekatan patroli terhadap kawasan hutan dilakukan per desa. Patroli pengamanan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan oleh UPTD KPH I-XIV melalui sosialisasi terhadap masyarakat desa di dalam kawasan hutan maupun disekitar kawasan hutan. Patroli pada kawasan mangrove dilakukan oleh UPTD Wilayah II, III, IV dan V.



Kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 375% dan melebihi target Renstra pada tahun ke 3. Diharapkan kegiatan yang menunjang IKU ini semakin efisien dan efektif untuk

mengurangi kerusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya.

Data Dukung Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi)

Aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran 1 Mengurangi kerusakan hutan, sumber daya alam dan ekosistemnya yaitu dengan Melakukan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan, diantaranya dilakukan oleh personil Polisi Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dan personil PTT di 14 KPH di Sumatera Selatan.

Upaya mendukung IKU Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove secara Mandiri maupun Terpadu (Lokasi) antara lain :

1. Adanya Pegawai Tetap Dalkar dan Pamhut bertugas diantaranya melakukan patroli dan sosialisasi di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV sangat berperan dalam upaya melakukan patroli pada kawasan hutan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan.
2. Adanya pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan yang bertugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan, hasil hutan,

tumbuhan dan satwa liar, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan melalui kegiatan Pre Emtif, Preventif, Represif dan Yustisif.

Tabel 23. Pelaksanaan patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan

No.	Nama KPH		Jumlah Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan		Lokasi Patroli Kawasan Hutan
1	2		3		4
1	UPTD KPH Wilayah I	Meranti	15	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Musi Rawas Utara
2	UPTD KPH Wilayah II	Lalan Mendis	13	Lokasi	Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin
3	UPTD KPH Wilayah III	Palembang-Banyuasin	15	Lokasi	Kab. Banyuasin, Kab. Dan Musi Banyuasin,
4	UPTD KPH Wilayah IV	Sungai Lumpur	9	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
5	UPTD KPH Wilayah V	Lempuing-Mesuji	7	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ilir
6	UPTD KPH Wilayah VI	Bukit Nanti Martapura	15	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu
7	UPTD KPH Wilayah VII	Mekakau Saka	23	Lokasi	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
8	UPTD KPH Wilayah VIII	Semendo	11	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat
9	UPTD KPH Wilayah IX	Suban Jeriji	2	Lokasi	Kab. Muara Enim dan Prabumulih
10	UPTD KPH Wilayah X	Dempo	16	Lokasi	Kab. Pagaralam
11	UPTD KPH Wilayah XI	Kikim Pasemah	16	Lokasi	Kab. Lahat
12	UPTD KPH Wilayah XII	Benakat	9	Lokasi	Kab. Muara Enim
13	UPTD KPH Wilayah XIII	Lakitan Bukit Cogong	12	Lokasi	Kota Lubuk Linggau
14	UPTD KPH Wilayah XIV	Rawas	8	Lokasi	Kab. Musi Rawas Utara

- Selain patroli (preventif), Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan pembatasan kerusakan Kawasan hutan melalui penindakan dan atau penanganan konflik kepentingan serta tindak pelanggaran terhadap kawasan hutan atas laporan dari masyarakat. Kegiatan penindakan bertujuan agar menimbulkan efek jera masyarakat. Kegiatan ini diantaranya :

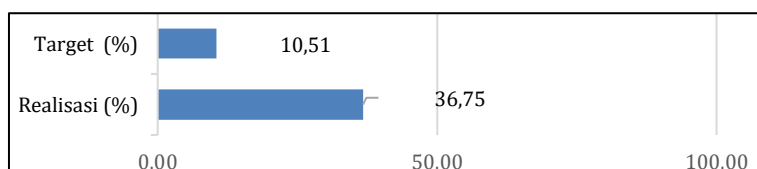
- a. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai konflik pelanggaran batas Kawasan hutan di Hutan Produksi (HP) Terusan Sialang UPTD KPH Wilayah V Lempuing Mesuji.
 - b. Menindaklanjuti laporan terkait perambahan kawasan hutan di wilayah UPTD KPH Wilayah VIII Semendo, Pembukaan lahan kawasan hutan dengan alat berat di wilayah UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Kabupaten Musi Banyuasin, Penanganan Illegal drilling berada di luar kawasan hutan, Penanganan perambahan kawasan hutan di wilayah UPTD KPH Wilayah VI Semendo Bukit Nanti, pembuka dan merintis lahan Kawasan Hutan Lindung Paraduan Gistang di Wilayah UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka.
4. Kegiatan Sosialisasi konflik manusia dan satwa liar di Dusun 9 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis dan Desa Tanjung Agung Kec. Semendo Darat Ulu Kab. Muara Enim wilayah UPTD Wilayah VIII Semendo dengan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, BKSDA Sumsel dan KPH setempat. Mitigasi ini meminimalkan korban akibat serangan satwa liar yang ada di wilayah ini seperti buaya senyulong dan harimau.
 5. Kegiatan koordinasi mitigasi konflik gajah di wilayah kerja UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding di Kayu Agung. Memonitor aksi mitigasi konflik gajah bersama Pemerintah Kabupaten, dan BKSDA Sumsel seperti : pembangunan posko oleh BKSDA dan PT. Sinar Mas di Desa Banyu Biru Kecamatan Air Sugihan Kab. OKI, mendatangkan 2 gajah jinak untuk membantu menjinakkan gajah liar, dan Pembangunan Barrier fisik maupun vegetasi.



Gambar 10. Koordinasi dan Sosialisasi mitigasi konflik manusia dan satwa liar dengan Pemerintah Kabupaten, BKSDA Sumsel dan PBPH

6. Koordinasi dalam rangka menyusun rencana mitigasi interaksi negatif manusia dan gajah di Desa SP V Tri Anggunjaya SP 5 HTI Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, UPTD KPH Wilayah XII Benakat. Mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kantong satwa liar agar melibatkan para pihak yang beraktfitas (PPKH, PBPH, Perkebunan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat). Mendesak para pihak untuk memfasilitasi pembentukan masyarakat desa mandiri pada desa-desa yang berada di dalam/sekitar home range gajah.

IKU 3. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

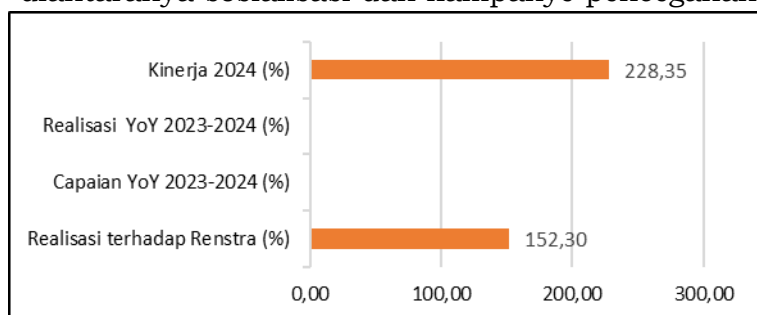


Pencegahan karhutla dilakukan oleh Dinas Kehutanan beserta UPTD mencapai luasan 24% dari luas kawasan hutan produksi dan hutan

lindung yang menjadi kewenangan Daerah. Cakupan luasan ini melalui berbagai upaya diantaranya sosialisasi dan kampanye pencegahan pada berbagai kesempatan pertemuan

dengan masyarakat di sekitar hutan.

Kinerja IKU ini sebesar 228,35% dan 152% dari target tahun ke 3 Renstra.



Data Dukung Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla (%)

Tabel 24. Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2024

Kabupaten	Diluar Kawasan Hutan	Didalam Kawasan Hutan					Jumlah (Ha)
	APL	HK	HL	HPT	HP	HPK	
Banyuasin	1.962,05	402,98	17,54		3,37	505,37	2.891,30
Empat Lawang	10,26						10,26
Kota Palembang	0,60						0,60
Kota Prabumulih	10,21						10,21

Kabupaten	Diluar Kawasan Hutan	Didalam Kawasan Hutan					Jumlah (Ha)
	APL	HK	HL	HPT	HP	HPK	
Lahat	5,23						5,23
Muara Enim	815,32			2,64	91,08	809,24	1.718,27
Musi Banyuasin	2.516,72	19,37	5,95	62,34	963,73	468,14	4.036,25
Musi Rawas	439,42				751,32	17,74	1.208,48
Musi Rawas Utara	678,32	6,00			184,71	2,70	871,73
Ogan Ilir	788,13						788,13
Ogan Komering Ilir	1.912,88	6,30	135,88		427,53	51,28	2.533,87
Ogan Komering Ulu	325,79		70,86		324,24		720,89
Ogan Komering Ulu Selatan	95,59		147,94				243,54
Ogan Komering Ulu Timur	77,82				1,97		79,79
Penukal Abab Lematang Ilir	281,58				22,35		303,93
Grand Total	9.919,91	434,65	378,18	64,98	2.770,30	1.854,47	15.422,48

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Upaya mendukung IKU Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla antara lain :

1. PTT Dalkar dan Pamhut bertugas diantaranya melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan di wilayah UPTD KPH wilayah I – XIV melalui ground check hotspot, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.
2. Pemantauan hotspot melalui Sistem Informasi Songket, penyebaran informasi melalui media sosial (WA dan Email)



Gambar 11. Patroli Kebakaran dan Pengamanan Hutan UPTD KPH VIII Semendo

3. Pembinaan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan pengendalian Karhutla dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 11 Perusahaan PBPH/HTI sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, organisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi Pemerintah ke 13 lokasi Perusahaan PPKH Migas, Minerba dan Non tambang lainnya sektor kehutanan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang diperoleh Mengetahui kesiapsiagaan perusahaan dalam rangka Pengendalian Karhutla, organisasi brigdalkarhutla, SDM, Sarpras serta kegiatan yang dilakukan terkait perencanaan, pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla.



Gambar 12. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada PBPH dan PPKH

5. Kegiatan dalam rangka pengukuran areal bekas terbakar kebakaran hutan dan lahan di 1 lokasi terindikasi bekas terbakar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Lokasi: PBPH PT. Tripupa Jaya
6. Penyusunan Buku Statistik Hotspot Tahun 2023, sehingga diperolehnya informasi dan data sebaran jumlah hotspot tiap kabupaten, jenis kawasan, jenis tanah, dan pemegang izin pemanfaatan hutan.
7. Koordinasi dan konsultasi ke KLHK, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait sinkronisasi data aplikasi SONGKET SUMSEL dengan data SIPONGI, dan wali data lainnya

Sasaran 3. Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan

Tolak ukur capaian sasaran Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan, diselesaikan sebagai berikut :

1. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)
2. Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)

Tabel 25. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
III	Mengurangi luas lahan kritis di luar kawasan hutan	1.	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)	10	130,08	1300
		2.	Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (%)	0,14	0,22	150

Tabel 26. Anggaran Bidang PDAS-RHL Tahun 2024 (APBD Perubahan)

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengelolaan Hutan		
	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Rp. 265.200.000	DBH Sawit

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp. 1.171.185.900	DBH Sawit
	Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp. 1.753.711.300	DBH Sawit
	Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp. 399.667.000	DBH Sawit
	Sub Kegiatan Penerapan teknis konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Rp. 539.736.000	DBH Sawit
	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		
	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Rp. 63.800.000	DBH Sawit
2.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya dukung Wilayah DAS	Rp. 40.000.000,00	APBD
Total		Rp. 4.233.300.200	

Berdasarkan Tabel di atas total pagu untuk mendukung sasaran 3 sebesar Rp. Rp. 4.233.300.200,- terbagi menjadi 2 sumber pendanaan yaitu Dana Bagi Hasil Sawit dan APBD. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah :

1. Program Pengelolaan Hutan

Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perbenihan Tanaman Hutan, terdiri dari 6 Sub Kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL pagu Rp. 265.200.000,- dengan realisasi keuangan 68,63% dan realisasi fisik 100%.
- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara pagu Rp. Rp1.753.711.300,- dengan realisasi keuangan 78,70 dan realisasi fisik 100%
- Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan pagu Rp. 539.736.000,- dengan realisasi keuangan Rp 44.869.550,- dan realisasi fisik 8,31%
- Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pagu Rp. 399.667.000,- dengan realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik 0

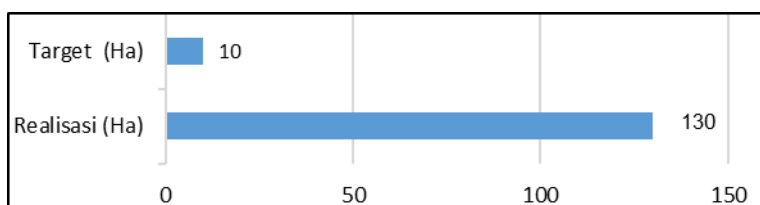
- e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan pagu Rp. 1.171.185.900,- dengan realisasi keuangan 83,04% dan realisasi fisik 100%
- f. Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar pagu Rp. 63.800.000,- dengan realisasi keuangan 85,74% dan realisasi fisik 100%

2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan.

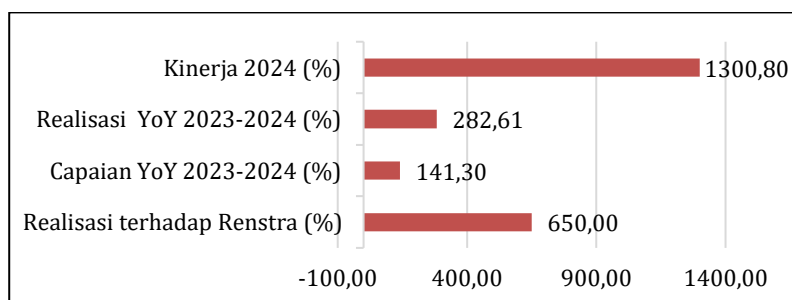
- a. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS pagu Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan 95,25% dan realisasi fisik 100%

Berdasarkan penjelasan di atas ada 2 Sub Kegiatan dari sasaran ini yang tidak tercapai nya realisasi pada Tahun 2024 yaitu Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan dan Pengembangan Teknologi Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan.

IKU 4. Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)



Luas lahan kritis yang dilakukan penanaman pada tahun 2024 sebesar 130,08 Ha, 13 kali lipat dari target. Terhadap capaian tahun lalu, meningkat 141 % dan terhadap target Renstra telah melampaui sebesar 650%. Hal ini dikarenakan kegiatan penanaman menjadi fokus APBD Sumberdana DBH Sawit.



Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman (Ha)

Sejalan dengan perkembangan waktu tekanan terhadap kawasan hutan semakin tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (*Illegal Logging*),

perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan air yang baik menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan analisis Lahan Kritis Provinsi Sumatera Selatan atas dasar Keputusan Dirjen PDASRH No: SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa lahan kritis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 seluas 707.169 Ha. Menurut pembagian kewenangan, rehabilitasi hutan seluas 472.519 ha adalah kewenangan Pusat dan rehabilitasi lahan seluas 234.650 ha kewenangan Daerah.

Tabel 27. Lahan Kritis dan Sangat Kritis Wilayah Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kekritisn Lahan						Jumlah Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Ha)
		Dalam Kawasan Hutan (ha)			Luar Kawasan Hutan (ha)			
		Kritis	Sangat Kritis	Total	Kritis	Sangat Kritis	Total	
1	Banyuasin	9.967,04		9.967,04	22,15		22,15	9.989,19
2	Empat Lawang	11.907,93	37.405,88	49.313,81	17.847,73	19.078,37	36.926,11	86.239,92
3	Kota Lubuk Linggau	5.025,08	847,08	5.872,16	1.939,05	76,43	2.015,48	7.887,64
4	Kota Pagar Alam	1.357,98	5.591,01	6.948,99	1.342,25	7.487,75	8.830,00	15.778,98
5	Kota Palembang			-			-	-
6	Kota Prabumulih			-			-	-
7	Lahat	31.879,94	20.928,33	52.808,27	16.760,78	17.793,47	34.554,25	87.362,51
8	Muara Enim	16.852,78	19.986,74	36.839,52	21.452,98	9.476,24	30.929,22	67.768,74
9	Musi Banyuasin	100.749,40		100.749,40	3.930,13		3.930,13	104.679,53
10	Musi Rawas	32.738,60	4.048,49	36.787,09	5.403,61	460,12	5.863,73	42.650,82
11	Musi Rawas Utara	18.782,64	1.646,70	20.429,35	6.075,43	251,80	6.327,23	26.756,58
12	Ogan Ilir			-			-	-
13	Ogan Komering Ilir	8.897,80		8.897,80	832,82		832,82	9.730,61
14	Ogan Komering Ulu	31.052,58	7.325,59	38.378,18	16.923,15	339,61	17.262,76	55.640,94
15	Ogan Komering Ulu Selatan	66.097,60	31.289,66	97.387,26	71.905,97	13.449,16	85.355,13	182.742,39
16	Ogan Komering Ulu Timur	2.507,84	612,41	3.120,25	1.801,00	0,00	1.801,00	4.921,25
17	Penukal Abab Lematang Ilir	5.019,67		5.019,67			-	5.019,67
Jumlah		342.837	129.682	472.519	166.237	68.413	234.650	707.168,78

Sumberdata :

1. Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 skala 1:50.000

Peran penting Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan rehabilitasi lahan yang berkelanjutan di daerah, terutama di wilayah kerja dan wilayah kelola UPTD yang wilayahnya tersebar secara administratif di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melalui program penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air (KTA) dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).

Dalam rangka pemulihan lahan kritis di luar Kawasan hutan, pada tahun 2024 Dinas Kehutanan menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Tahun 2025. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) adalah rencana yang disusun untuk melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan. Rencana ini disusun pada tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum kegiatan (T-1). Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) merupakan dokumen rencana rehabilitasi lahan yang akan dilaksanakan di luar Kawasan Hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) yang bersifat operasional. RTnRL Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) Tahun 2022– 2032. Dokumen ini merupakan pedoman atau acuan dalam menentukan kegiatan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai sumber pendanaan antara lain APBD Sumsel, APBN, Sektor Usaha serta penentuan lokasi yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) tahun 2025 adalah agar pelaksanaan rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan secara tepat dan terarah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang telah ditetapkan dalam RURHL-DAS dalam rangka pemulihan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi dan/atau pengembangan sumberdaya air.

Rehabilitasi Lahan Tahun 2025 wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan diluar kawasan hutan / Areal Penggunaan Lain (APL) pada ekosistem daratan, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Kegiatan rehabilitasi lahan dapat berupa penerapan vegetatif maupun penerapan sipil teknis. Sasaran kegiatan rehabilitasi lahan melalui penerapan vegetatif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berupa Kebun Bibit Rakyat, Penghijauan Lingkungan, Agroforestry, Rehabilitasi Lahan Mangrove, Rehabilitasi Lahan Gambut, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi DAS Pemegang PPKH di Luar Kawasan Hutan. Kegiatan rehabilitasi lahan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 melalui penerapan sipil teknis adalah teknik konservasi tanah dan air yang dilaksanakan dalam bentuk pembuatan bangunan berupa Dam Penahan (DPn), *Gully Plug* (GP) dan Sumur Resapan Air (SRA).



Gambar 13. Dokumen RTnRL dan Penyusunan Dokumen RTnRL Tahun 2024

Dinas Kehutanan telah melaksanakan penanaman jenis-jenis Multipurpose Tree Species (MPTS) dan tanaman kayu-kayuan endemik Sumatera Selatan di luar Kawasan hutan seluas 130,08 ha diantaranya melalui : (1) Pembagian bibit kepada masyarakat yang dilaksanakan di 14 UPTD (2) Pembagian bibit kepada masyarakat/kelompok masyarakat. (3) Penanaman dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia HMPI. MPTS adalah tanaman yang memiliki banyak fungsi, seperti menghasilkan buah, kayu, daun, bunga, dan biji. Tanaman MPTS dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan makanan, pakan ternak, dan kayu bakar sehingga bermanfaat secara ekologi, ekonomi dan produksi bagi masyarakat.

Jumlah bibit yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 19.592 batang dengan luas konversi 400 batang/Ha berupa Tanaman Kehutanan, MPTS, dan Tanaman Buah. Sedangkan rincian lokasi penanaman sebagaimana tabel berikut :

Tabel 28. Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Yang Direhabilitasi Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun/ Kegiatan	Lokasi				Luas (Ha)	Keterangan
			Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota		
1	Penghijauan	1.	Kebun Bung, Jakabaring, Bukit Lama dan Srijaya	Sukarame, Seberang Ulu I, Ilir Barat I dan Alang-alang Lebar	Palembang	9,02	Dilaksanakan oleh UPTD KPH
		2.	Pangkul, Karang Raja dan Sumaja Makmur	Cambai, Prabumulih Timur dan Rambang Kapak Tengah	Prabumulih	6,00	
		3.	Cinta Jaya dan Kayu Agung	Pedamaran dan Kayu Agung	OKI	3,75	
		4.	Indralaya	Indralaya Utara	Ogan Ilir	0,10	
		5.	Sukorejo	STL Ulu Terawas	Musi Rawas	2,00	
		6.	Tanjung Baru	Baturaja Timur	OKU	2,30	
		7.	Sukaraja I dan Danau Jaya	Buay Sandang Aji dan Buay Pemaca	OKU Selatan	7,00	
		8.	Tegal Rejo, Muara Enim, Tanjung Karang, Lembak dan Lubuk Raman	Lawang Kidul, Muara Enim, Tanjung Agung, Lembak dan Rambang Niru	Muara Enim	50,09	
		9.	Lahat, Beringin, Lesung Batu, Sinjar Bulan, Tanjung Raja, Padang, Pagar Agung, dan Bandar jaya.	Lahat, Merapi Selatan, Mulak Ulu, dan Gumai Ulu	Lahat	4,91	
		10.	Sungsang IV	Banyuasin II	Banyuasin	1,00	
		11.	Muara Danau	Lintang Kanan	Empat Lawang	1,00	
2.	Penghijauan	1	Mendis Jaya	Bayung Lencir	Muba	1,00	Dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia
		2	Belalau I	Lubuk Linggau Barat I	Lubuk Linggau	1,00	
		3	Karang Raja	Prabumulih Timur	Prabumulih	1,00	
		4	Batu Marta Blok C	Madang Suku III	OKU Timur	1,00	
		5	Lesung Batu	Mulak Ulu	Lahat	1,00	
		6	Muara Enim	Muara Enim	Muara Enim	1,00	
		7	Beringin Jaya	Pagar Alam Utara	Pagar Alam	1,00	
		8	Bumi Harjo makmur	Lempuing	OKI	1,00	
3.	Penghijauan	1	Muara Medak	Bayung Lencir	Muba	3,10	Dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan
		2	Sukorejo, Jajaran Baru I, Jajaran Baru II, Rejosari, Mekarsari, Muara Megang dan Campur Sari	Megang Sakti, STL Ulu Terawas	Mura	3,10	
		3	Pangkul, Muara Sungai, Cambai, Rambang Senuling, Sumaja	Gunung Megang, Rambak Kapak Tengah, dan Cambai	Muara Enim, Prabumulih	3,10	

No	Tahun/ Kegiatan	Lokasi			Luas (Ha)	Keterangan
			Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	
			Makmur, dan Karang Raja			
		4	Batu Marta Blok C	Madang Suku III	OKU Timur	3,10
		5	Lesung Batudan Pandan Arang Ulu	Mulak Ulu, Kota Agung	Lahat	6,20
		6.	Candi Jaya	Dempo Tengah	Pagar Alam	3,10
		7.	Sipatuhu	Banding Agung	OKU Selatan	3,10
		8.	Kayuara Kuning	Banyuasin III	Banyuasin	3,10
		9	Simpang Tiga Jaya dan Ulak Piangu	Tulung Selapan, Pampangan	OKI	6,20

Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan



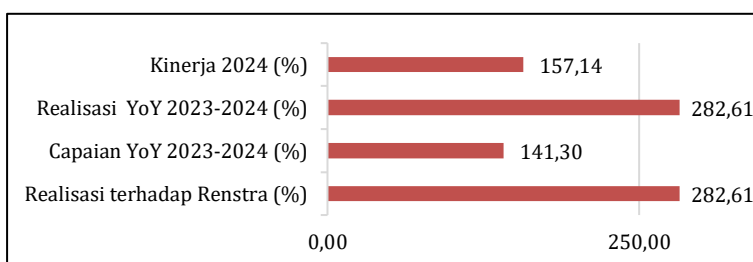
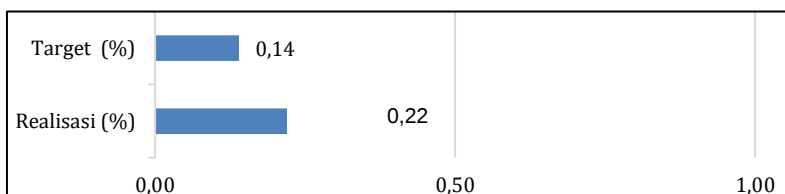


Gambar 14. Kegiatan Penyediaan Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah di UPTD KPH



Gambar 15. Penanaman Bibit Pohon Kehutanan/MPTS/Tanaman Buah

IKU 5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)



Luas lahan kritis yang direhabilitasi Tahun 2024 indikator ini terealisasi sebesar 0,21%, yang diperoleh dari luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan yang direhabilitasi seluas 2.676 Ha dibagi dengan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan seluas 707.169 Ha, melebihi target

yang ditetapkan sebesar 0,14% sehingga capaiannya sebesar 150%. Realisasi terhadap tahun lalu mencapai 282,61 % dengan Tingkat capaian sebesar 141,30%.

Data Dukung Capaian Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan rehabilitasi baik di kawasan hutan dan maupun lahan di luar kawasan hutan seluas 707.169 Ha. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Penghijauan merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Sebagai pengatur tata air untuk mencegah banjir maupun untuk melindungi lingkungan yaitu mencegah timbulnya pencemaran.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Percepatan pelaksanaan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 260/KPTS/DIHUT/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pananaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini mendorong kemajuan rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang terus meningkat. Progres rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2018 – 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 29. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2024

No	Pelaksana	Sumber Dana	TAHUN (HA)							JUMLAH (HA)	RINCIAN LOKASI REHABILITASI				JUMLAH (HA)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		HP	HL	KK	APL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemegang Kewajiban IPPKH	Pihak ke-3	742	963	863	478	849	2.317	4.756,4	10.968,4	300	8.770,4	1.898	-	10.968,4
2	Kementerian LHK / Balai PDASHL Musi	APBN	700	10.400	-	3.100	1.500	320	661	16.681	300	16.340	-	41	16.681
3	Kementerian LHK / Balai PDASHL Ketahun	APBN	-	7.250	-	-	-	-	-	7.250	-	7.250	-	-	7.250
4	Badan Restorasi Gambut Mangrove	APBN	10	50	-	20	15	-	-	95	73	-	-	22	95
5	Dinas Kehutanan *)	APBD	-	2	-	4	25	29	42,98	102,98	60	-	-	42,98	102,98
6	PEN Rehabilitasi Mangrove (BRGM)	APBN	-	-	-	250	-	-	-	250	-	250	-	-	250
7	Kerjasama Para Pihak (PLN, SKK Migas, PT.PUSRI, dan Pihak Lainnya)	CSR BUMN	-	-	-	-	9	10	46,41	64,41	-	45,41	-	20	65,41
TOTAL PER TAHUN			1.452	18.665	863	3.852	2.398	2.676	5.506,79	35.412,79	733	32.655,81	1.898	125,98	35.412,79

Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Keterangan : HP : Hutan Produksi, HL: Hutan Lindung, KK: Kawasan Konservasi, APL: Areal Penggunaan Lain

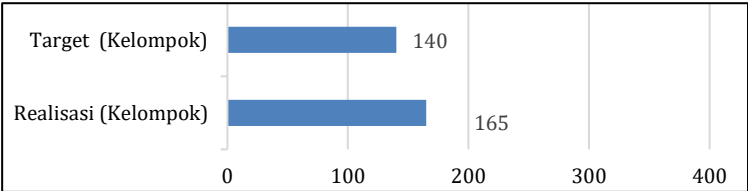
Sasaran 4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial

Kinerja pada sasaran 4 dicapai melalui indikator kinerja Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
IV	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	1.	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)	140	352	251,4

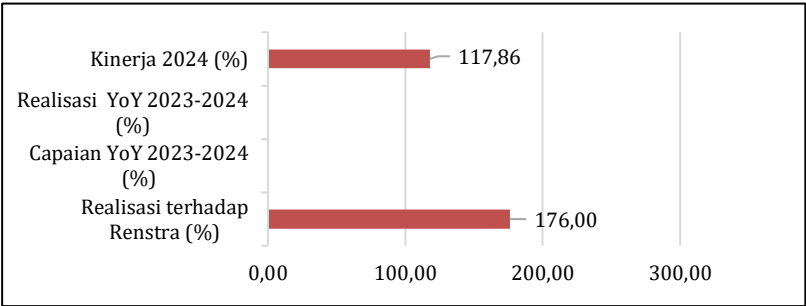
Total pagu untuk mendukung sasaran 4 sebesar Rp. 436.681.400,- dengan realisasi keuangan 95,90% dan realisasi fisik 100%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

IKU 6. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)



Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok) terealisasi

sebanyak 251,43% dari target yang ditentukan, Terhadap target Renstra telah mencapai 176%. IKU ini didukung oleh pendanaan yang kuat, partisipasi pihak lain baik APBN (UPT KLHK) dan pihak ke 3 sehingga target pendampingan tercapai.



Dukungan program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2024 dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2024 sebagai berikut :

- Program : Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan
- Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan pagu 30.547.000,- dengan realisasi keuangan 99,78% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bimbingan terhadap para penyuluh kehutanan di lapangan dalam rangka penyusunan Program serta melakukan kegiatan monitoring kegiatan penyuluh di tingkat tapak. Disamping itu juga, Dinas Kehutanan juga melakukan kerjasama kegiatan peningkatan kapasitas para penyuluh kehutanan dengan beberapa lembaga diantaranya dari BPSKL, BPHP dan mitra pembangunan. Target peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh dari target 20 orang telah terlaksana sebanyak 42 orang yang ditingkatkan melalui kolaborasi atau kerjasama antar lembaga tersebut.



Gambar 16. *Training Of Trainer* Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh ICRAF

2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan pagu Rp. 296.134.400,- dengan realisasi keuangan 94,30% dan realisasi fisik 100%. Pembagian dari jumlah anggaran tersebut yaitu untuk seksi penyuluhan sebesar Rp. 155.636.600,- dan sisanya terbagi untuk seluruh 14 UPTD KPH (Rp. 140.000.000,-) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan sebagai akomodasi personil tingkat KPH dalam pelaksanaan penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan. Kegiatan dalam rangka penguatan dan pendampingan juga diiringi dengan penyediaan Alat Ekonomi Produktif yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bagi kelompok tani hutan yang menyasar 1 KTH. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024 ditujukan untuk kelompok- kelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk mendapatkan

bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Alokasi Pemberian AEP diberikan kepada KTH Medak Lestari di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis mesin untuk pengolahan pasca panen buah jagung yaitu mesin pemipil dan mesin pemecah jagung.



Gambar. Penyerahan Alat Ekonomi produktif

3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan pagu Rp. 110.000.000,- dengan realisasi keuangan 99,13% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial meliputi 2 agenda kegiatan yaitu Perhutanan Sosial dan Pengembangan Hutan Hak/Rakyat. Agenda kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 terdata sebanyak 19 usulan Perhutanan Sosial dengan luas ± 13.688 Ha meliputi 1.642 Kepala Keluarga. Namun Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan persetujuan perhutanan sosial sebanyak 8 unit.

Tabel 30. Jumlah Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2010 - 2024

No.	UPTD KPH	Tahun					JUMLAH KPS
		2010 - 2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wilayah I Meranti	10		3			13
2.	Wilayah II Lalan Mendis	8		3	1	4	16
3.	Wilayah III Palembang Banyuasin	16	4	7	1	3	31
4.	Wilayah IV Sungai Lumpur-Ridding	2		2			4
5.	Wilayah V Lempuing Mesuji	28					28
6.	Wilayah VI Bukit Nanti Martapura	36					36

No.	UPTD KPH	Tahun					JUMLAH KPS
		2010 - 2020	2021	2022	2023	2024	
7.	Wilayah VII Mekakau Saka	31		4			35
8.	Wilayah VIII Semendo	23				1	24
9.	Wilayah IX Suban jeriji	2	1	3			6
10.	Wilayah X Dempo	10					10
11.	Wilayah XI Kikim Pesemah	4		1	1		6
12.	Wilayah XII Benakat	1		4			5
13.	Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong	7	1				8
14.	Wilayah XIV Rawas	0			1		1
JUMLAH		178	6	27	4	8	223

Jumlah usulan perhutanan sosial yang ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis sebanyak 17 usulan dengan hasil sebanyak 10 usulan dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut dan 7 usulan tidak dapat diproses lebih lanjut. Usulan yang tidak dapat diproses, disebabkan karena kondisi objek atau areal yang diusulkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya terdapat tanaman sawit, kondisi lahannya masih berupa hutan primer, gambut dalam fungsi lindung dan belum ada kepastian batas administrasi desa. Permasalahan juga merujuk pada subjek penerima dikarenakan belum mendapatkan persetujuan di beberapa lokasi oleh Kepala Desa setempat dalam hal penandatanganan pernyataan terkait lahan garapan para anggota Kelompok Tani Hutan.



Gambar 17. Verifikasi Teknis Permohonan Persetujuan Kemitraan Konsesi Antara PT ESA YASA DINAMIKA (PT EYD) dengan KTH Rawas Ulu Bersatu Di Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Kegiatan Dinas Kehutanan yang bekerja sama dengan mitra/NGO untuk pencapaian target pendampingan kepada Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31. Kegiatan pendampingan Masyarakat bekerjasama dengan Mitra/NGO

No	Mitra/NGO	Kegiatan	Lokasi dan Waktu
1	PT.PUSRI	Kesepakatan Pemberdayaan Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial KUPS Kopi Ringkeh MHA Tebat Benawa	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, 4 Januari 2024
2	WRI Indonesia	1. Pengembangan Potensi Hutan Rakyat Sumatera Selatan 2. Pengembangan Pohon Asuh 3. Optimalisasi SI Hutsos	Maret – Agustus 2024

No	Mitra/NGO	Kegiatan	Lokasi dan Waktu
3	ICRAF	Rekonsiliasi kegiatan dalam PKS antara Dinas Kehutanan dan ICRAF tentang bentang lahan berkelanjutan untuk ketahanan penghidupan terhadap perubahan iklim	Dishut Prov. Sumsel, 31 Mei 2024
4.	WRI Indonesia	Pelatihan dan Penguatan Kapasitas pada Kelembagaan MHA Mude Ayek Tebat Benawa	Kota Pagar Alam, 20- 21 Juni 2024
5	ICRAF	Kegiatan Training of Trainer Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial Prov. Sumatera Selatan	Hotel Santika, 17-18 Juli 2024
6	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Implemtasi Rehabilitasi Ekosistem Magrove Desa Simpang Tiga Jaya	Desa Simpang Jaya Kab. OKI, 22-25 Juli 2024
7	WRI Indonesia	Pengecekan Lapangan Potensi Calon Lokasi Hutan Rakyat pada KTH yang ada dalam Wilayah VIII Semendo, Kab. Muara Enim	Kabupaten Muara Enim, 13-16 Agustus 2024
8.	WRI Indonesia	Groundchek Potensi Calon Lokasi Hutan Rakyat pada KTH yang ada dalam Wilayah XI Kikim- Pasemah, Kab. Lahat	Kab. Lahat, 20-23 Agustus 2024
9.	ICRAF	Lokakarya Diseminasi Training of Trainer Sistem Informasi Akses Lahan dalam Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja UPTD KPH Wil.II Lalan- Mendis Kab. Musi Banyuasin	Kec. Banyung Lencir, 28 Oktober- 2 November 2024

Sumber data: Bidang PPM Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Dukung Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan (Kelompok)

Sampai dengan tahun 2024, Persetujuan Perhutanan Sosial mencapai 223 unit dengan 5 (lima) mekanisme yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan. Jumlah areal seluas 139.002,23 Ha dan dikelola oleh 33.034 KK. Rincian sebagaimana pada tabel 30.

Pengelolaan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya. Peran serta aktif masyarakat dapat terealisasi apabila mereka mengetahui dan sadar serta peduli terhadap eksistensi hutan bagi mereka.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan upaya Gerakan memasyarakatkan hutan dan peduli lingkungan serta seksistensinya melalui kegiatan penyuluhan kehutanan yang didukung oleh perencanaan penyuluhan yang mantab dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi penyuluhan kehutanan tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan antara lain penetapan berbagai ketetapan atau pronsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluhan kehutanan.



Gambar 18. Bimbingan Teknis Kelompok Tani Hutan



Gambar 19. Pendampingan Kelompok Tani Hutan

Tabel 32. Rekapitulasi Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 2024

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. I MERANTI	Muba	0	0,00	0	6	3214,29	856	4	6.821,00	283	3	960,00	285	0	0	0	13	10.995,29	1.424
WIL. II LALAN-MENDIS	Muba, Banyuasin	2	12.185,00	1.294	9	6945,00	929	2	4.080,00	484	3	17.373,14	3.032	0	0	0	16	40.583,14	5.739
WIL. III PALEMBANG-BANYUASIN	Banyuasin	1	553,00	19	27	6245,50	1745	0	0,00	0	3	1.548,00	882	0	0	0	31	8.346,50	2.646
WIL. IV SUNGAI LUMPUR-RIDING	OKI	1	505,00	26	2	2139,00	160	0	0,00	0	1	10.000,00	1.700	0	0	0	4	12.644,00	1.886
WIL. V LEMPUING-MESUJI	OKI	0	0,00	0	0	0,00	0	28	7.150,34	2.654	0	0,00	0	0	0	0	28	7.150,34	2.654
WIL. VI BUKIT NANTI-MARTAPURA	OKU, OKU Timur	0	0,00	0	4	1030,00	508	32	1.915,73	269	0	0,00	0	0	0	0	36	2.945,73	777
WIL. VII MEKAKAU-SAKA	OKU Selatan	0	0,00	0	32	16289,64	3824	3	2.217,00	337	0	0,00	0	0	0	0	35	18.506,64	4.161
WIL. VIII SEMENDO	Muara Enim, Lahat	14	17.878,00	3.872	9	3058,00	950	0	0,00	0	0	0,00	0	1	44	344	24	20.979,70	5.166
WIL. IX SUBANJERIJ	Muara Enim, Prabumulih	1	175,00	791	5	499,70	218	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	674,70	1.009
WIL. X DEMPO	Pagar Alam	0	0,00	0	9	2923,00	1116	0	0,00	0	0	0,00	0	1	336	234	10	3.259,00	1.350

UPTD KPH	Kab	HD			HKm			HTR			Kemitraan			Hutan Adat			Total		
		Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK	Unit	Ha	KK
WIL. XI KIKIM PASEMAH	Lahat, Empat Lawang	1	313,00	260	5	2238,40	660	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	6	2.551,40	920
WIL. XII BENAKAT	Muara Enim, Pali, Muba, Mura, Lahat	0	0,00	0	1	5800,00	541	0	0,00	0	4	274,79	100	0	0	0	5	6.074,79	641
WIL. XIII LAKITAN-BUKIT COGONG	Mura	7	2.897,00	4.504	1	290,00	90	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	8	3.187,00	4.594
WIL. XIV RAWAS	Murat ara	1	1.104,00	67				0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1	1.104,00	67
JUMLAH		28	35.610,00	10.833	110	50.672,53	11.597	69	22.184,07	4.027	14	30.155,93	5.999	2	380	578	223	139.002,23	33.034

Penyuluh kehutanan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Penyuluh kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lainnya, yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai asset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar Kawasan hutan yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan- hutan rakyat, dan bahkan juga di daerah perkotaan. Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan.

Salah satu kriteria untuk mengukur kemajuan pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui penilaian kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu kelas pemula, madya, dan utama. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha Berdasarkan penilaian terhadap KTH yang mengelola Kawasan hutan kelas Madya baru 25,57% sedangkan untuk KTH yang membudidayakan tanaman kehutanan (di luar Kawasan hutan) hanya 16,67%. Hal ini tantangan bagi Dinas Kehutanan untuk dapat meningkatkan kelas KTH bagi 223 Kelompok Perhutanan Sosial dan 30 KTH.

Tabel 33. Hasil Penilaian Kelas Kelompok Perhutanan Sosial

No	UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial	Blm Dinilai	Kelas KTH		
				Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	13	12	1	0	0
2.	Lalan Mendis	12	5	5	2	0
3.	Palembang Banyuasin	28	23	4	1	0
4.	Sungai Lumpur Riding	4	4	0	0	0
5.	Lempuing Mesuji	28	10	5	13	0
6.	Bukit Nanti Martapura	9	0	6	3	0
7.	Mekakau Saka	35	19	6	10	0
8.	Semendo	23	3	0	20	0
9.	Suban Jeriji	6	4	2	0	0
10.	Dempo	10	3	0	7	0
11.	Kikim Pesemah	5	4	0	1	0
12.	Benakat	5	4	1	0	0

No	UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial	Blm Dinilai	Kelas KTH		
				Pemula	Madya	Utama
13.	Lakitan Bukit Cogong	8	1	7	0	0
14.	Rawas	1	1	0	0	0
JUMLAH		187	93	37	57	0

Tabel 34. Kelas Kelompok Tani Hutan (Di Luar Kawasan Hutan)

No	UPTD KPH	Jumlah KTH	Kelas KTH		
			Pemula	Madya	Utama
1.	Meranti	-	-	-	-
2.	Lalan Mendis	-	-	-	-
3.	Palembang Banyuasin	-	-	-	-
4.	Sungai Lumpur Riding	-	-	-	-
5.	Lempuing Mesuji	-	-	-	-
6.	Bukit Nanti Martapura	2	2	-	-
7.	Mekakau Saka	1	-	1	-
8.	Semendo	8	6	2	-
9.	Suban Jeriji	22	20	2	-
10.	Dempo	-	-	-	-
11.	Kikim Pesemah	2	1	1	-
12.	Benakat	-	-	-	-
13.	Lakitan Bukit Cogong	1	1	-	-
14.	Rawas	-	-	-	-
JUMLAH		36	30	6	0

Dinas Kehutanan telah melaksanakan upaya pendampingan KTH, namun hasil yang diharapkan belum optimal. Jumlah SDM (penyuluh kehutanan) dan sebarannya tidak merata dan belum bisa mengakomodir kegiatan penyuluhan/pendampingan pada KTH. PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) juga belum dapat diakomodir dalam kegiatan pendampingan karena keterbatasan pendanaan, padahal PKSM merupakan potensi yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan karena biasanya PKSM berdomisili di sekitar Kawasan hutan. Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat.

Tabel 35. Jumlah dan sebaran penyuluh kehutanan dan kelompok masyarakat

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
1.	Dinas Kehutanan	Palembang	3	8	-	-	11	-	-	-
2.	Wil. I Meranti	Sekayu	1	1	-	-	2	13	-	13
3.	Wil. II Lalan Mendis	Bayung	3	1	-	2	6	16	-	16

No	UPTD KPH	Lokasi Penempatan	PK ASN Dalam Jabatan					Jumlah KPS/KTH		
			PNS	P3K	Non ASN (PPTPK)	PKSM	PKSM	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
		Lencir								
4.	Wil. III Palembang-Banyuasin	Palembang	4	1	1	-	6	31	-	31
5.	Wil. IV Sungai Lumpur-Ridding	OKI	1	1	1	4	7	4	-	4
6.	Wil. V Lempuing Mesuji	OKI	3	1	1	4	G	28	-	28
7.	Wil. VI Bukit Nanti-Martapura	Baturaja	6	3	2	5	16	36	2	38
8.	Wil. VII Mekakau Saka	Muara Dua	2	2	1	13	18	35	1	36
9.	Wil. VIII Semendo	Muara Enim	1	2	2	23	28	24	8	32
10.	Wil. IX Suban Jeriji	Prabumulih	4	1	-	27	32	6	22	28
11.	Wil. X Dempo	Pagar Alam	1	1	-	2	4	10	-	10
12.	Wil. XI Kikim Pesemah	Lahat	4	1	1	3	G	6	2	8
13.	Wil. XII Benakat	PALI	1	1	-	1	3	5	-	5
14.	Wil. XIII Lakitan Bukit Cogong	Lubuk Linggau	5	1	1	10	17	8	1	9
15.	Wil. XIV Rawas	Musi Rawas	0	-	1	-	1	2	-	2
JUMLAH			36	25	11	64	166	224	36	260

Dampak dari pendampingan terhadap KTH yang mengelola usaha kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan, di antaranya: Peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan penyerapan tenaga kerja, Peningkatan Indeks Desa Mandiri (IDM), dan Peningkatan tutupan lahan. Salah satu parameter kinerja penyuluh kehutanan dalam mendampingi KTH adalah nilai transaksi ekonomi (NTE). NTE KTH dihitung dan direkam pada aplikasi SIMLUH. Pengukuran NTE KTH merupakan kewajiban penyuluh kehutanan pendamping KTH binaannya. NTE perhutanan sosial Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp 41,7 milyar, sedangkan NTE KTH mencapai Rp 2,3 milyar. Sementara itu, potensi NTE baik KTH maupun perhutanan sosial bisa mencapai lebih dari nilai tersebut, apabila seluruh KTH memperoleh pendampingan penyuluh.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai IKU 6 berupa kualitas dari pendampingan kelompok tani itu sendiri dan hasil yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah, sebaran dan kompetensi SDM penyuluh kehutanan yang belum memadai
2. Penyuluhan memerlukan alokasi dana yang tinggi, mengingat keberadaan KTH tersebar dan akses menuju lokasi sulit terutama untuk wilayah perairan.
3. Belum adanya kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Perhutanan Sosial. Pemerintah daerah masih berpendapat bahwa kehutanan adalah wewenang Pemerintah Provinsi.

4. Pemberdayaan PKSM
5. Pemegang persetujuan perhutanan sosial (KTH) yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Masih terjadinya konflik tenurial dalam areal kawasan hutan maupun dalam lokasi persetujuan perhutanan sosial
7. Potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang ada belum bisa dikembangkan secara optimal dikarenakan keterbatasan modal serta sarana dan prasarana pendukung
8. Optimalisasi manajemen kelembagaan tani yang masih kurang
9. Kelompok tani hutan di luar kawasan hutan yang belum terdata dengan baik
10. Pelibatan KTH di luar kawasan hutan dalam kegiatan pembangunan kehutanan yang belum memadai, karena masih terfokus kegiatan pembangunan kehutanan di dalam kawasan hutan.
11. Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang belum berjalan secara optimal
12. Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber yang masih rendah, seperti akses permodalan, pemasaran dan diversifikasi produk serta jalinan kemitraan yang masih belum terfasilitasi dengan baik

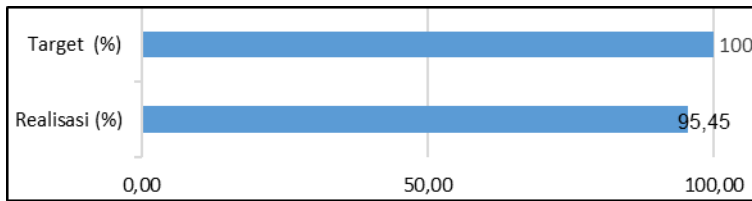
Sasaran 5. 'Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar 100%, yang diperoleh dari jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran pada tahun 2024. Kinerja pada sasaran 5 dicapai melalui indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
V	Meningkatnya kinerja ASN Kehutanan dan pelayanan publik	7.	Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)	100	95,46	95,46

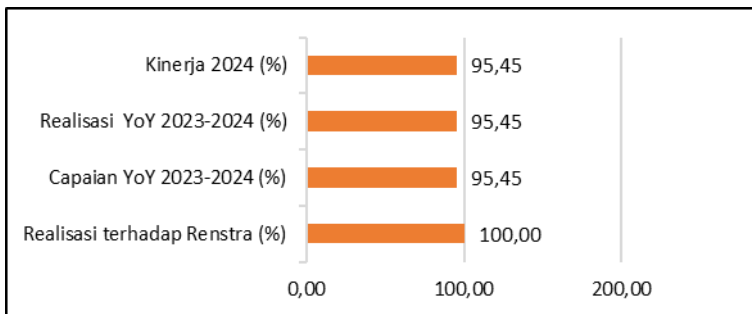
Total pagu untuk mendukung sasaran 5 sebesar Rp. 52.326.864.564,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.910.332.068 atau 95,38 % dan realisasi fisik 99,87%. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU 7. Persentase pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah (%)



Jumlah kegiatan operasionalisasi perkantoran yang terlaksana pada tahun 2024 sebanyak 21 kegiatan dari 22 kegiatan yang direncanakan

dalam Renstra sehingga kinerja layanan telah terpenuhi 100 %. Dibandingkan tahun 2023 pemenuhan layanan kinerja Perangkat Daerah sebesar 95,45% dan terhadap Renstra sebesar 95,45%.



Data Dukung Capaian Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.100.000.000 terrealisasi sebesar Rp.99.852.706 atau 99,85 %. Output dari kegiatan ini berupa dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU serta pengumpulan data dokumen perencanaan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 % target terpenuhi. Realisasi sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Perjalanan dinas biasa dilakukan untuk kordinasi ke UPTD KPH Wilayah I-XIV dan KLHK.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 126.000.000,- terrealisasi sebesar Rp 125.774.402,00 atau 99,88 %. Koordinasi ini dilakukan ke UPTD KPH, KLHK, Menpan RB dan Mendagri. Output dari kegiatan ini berupa laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Target output sebanyak 11 laporan, terealisasi sebanyak 11 laporan atau sebesar 100 %.

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 45.638.736.364,- terrealisasi sebesar Rp. 43.454.974.404. atau 95,22 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target output sebanyak 399 orang, terealisasi dengan baik atau sebesar 95,22 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Fungsional Umum PNS, Tunjangan Beras PNS, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Pembulatan Gaji PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS. Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah terdapat pegawai ASN yang pensiun dan pindah tugas ke OPD yang lain

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 223.280.000,- terrealisasi sebesar Rp. 223.280.000 atau 100 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Realiasi sub kegiatan ini berupa belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 69.545.200,- terrealisasi sebesar Rp 68.689.323 atau 98,77 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Koordinasi dilakukan ke UPTD KPH Wilayah I-XIV, Bidang pada Lingkup Dinas Kehutanan, Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah dan Bank Sumsel Babel. Output dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. Target output sebanyak 12 laporan,

terrealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Anggaran Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 42.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 41.910.700 atau 99,79 %. Sub kegiatan ini berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Target output sebanyak 1 (satu) dokumen, terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100 %. Perjalanan dinas dilakukan ke Kab. Musi Banyuasin, Kab OKU, Kota Batam, Kab.OKI, Kab. Banyuasin dan Kab.Lahat

7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Anggaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp. 32.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 31.793.700 atau 99,36 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Target output sebanyak 1 dokumen, Kegiatan ini berjalan dengan baik, Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan Kab. Musi Banyuasin, Kab. OKI, Kab. OKUS.

8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 12000000,- terrealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %. Evaluasi dari kegiatan ini adalah Tidak ada pemanggilan calon peserta diklat dari Dinas Kehutanan oleh lembaga pelaksana Diklat

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 39.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 38,762.339,- atau 99,39 %. Sub kegiatan ini berupa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau 100 persen target output dapat terlaksana.

Kegiatan ini berjalan dengan baik, Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah perlunya perombakan total terhadap komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan. Instalasi yang ada merupakan instalasi yang sudah tua sehingga perlu perbaikan terhadap komponen listraik yang sudah tua.

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 50.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 49.800.837,- atau 99,60 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik.

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 140.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 139.585.287,- atau 98,69 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Bahan yang dibeli adalah alat tulis kantor. Target output sebanyak 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 99,70 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik.

12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 52.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 45.461.307,- atau 87,43 %. Realisasi dari subkegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Target output sebanyak 1 paket. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 12.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 5.940.000 ,- atau 99,00 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan. Target output sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan efisiensi

14. Fasilitas Kunjungan Tamu

Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 85.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 81.830.000,- atau 99,57 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 96,27 %. Realisasi sub Kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (12 Laporan). Evaluasi terhadap kegiatan ini

adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi dengan baik.

15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 940.000.000 terrealisasi sebesar Rp. 939.370.239,- atau 99,71 %. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (250 laporan), terealisasi sebanyak 250 laporan atau sebesar 98,67 %. Sub kegiatan ini terdiri atas belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas dilakukan ke Kab. Musi Banyuasin, Kab. PALI, Kab. OKI, Jakarta, Bandung dan Kab. OKU.

Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Serapan anggaran dan target output dapat terrealisasi. Terdapat evaluasi untuk perjalanan dinas luar provinsi didapatkan bahwa pagu anggaran tiket pesawat pada permendagri untuk beberapa kota lebih rendah dibandingkan dengan biaya riilnya.

16. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 25.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 2.5000.000,- atau 100%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan. Kegiatan ini berupa sewa gedung untuk UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti. Target output sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, realisasi anggaran mencapai 100 %

17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 15.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 11.642.900,- atau 77,62 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos dan belanja paket/pengiriman. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %.

Evaluasi terhadap serapan anggaran sebesar 77,62 % dikarenakan saat ini banyak surat menyurat yang sudah menggunakan online, sehingga serapan anggaran menjadi kecil. Tetapi target output dapat dipenuhi 100 %.

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 645.732.000,- . realisasi sebesar Rp. 509.934.486,- atau 78,97 %. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Realisasi sub kegiatan ini berupa Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV

Berlangganan. Evaluasi terhadap serapan yang sebesar 78,97 %. Dikarenakan sebagian kantor KPH menggunakan token listrik. Penghitungan token listrik dari KPH terlalu tinggi sehingga menyebabkan over estimate anggaran. Kedepannya penghitungan kantor KPH yang menggunakan token listrik akan dihitung lebih akurat.

19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 3.419.300.000,- terrealisasi sebesar Rp. 3.419.300.000,- atau 100 %. Realisasi sub kegiatan ini adalah Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan.

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target output sebanyak 12 laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggran mencapai 100 %.

20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 567.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 514.184.438,- atau 90,69 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, belanja asuransi barang milik daerah, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua. target output sebanyak 25 unit, terealisasi sebanyak 25 unit atau sebesar 100 %.

Evaluasi terhadap kegiatan ini adalah pada penghitungan pajak. Penghitungan perkiraan pajak kendaraan terlalu besar sehingga anggaran tidak terserap 100%. Untuk tahun 2025 akan dilakukan perkiraan penghitungan pembayaran pajak yang lebih akurat.

21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 93.271.000,- terrealisasi sebesar Rp. 83.245.000,- atau 89,25 %. Realisasi dari sub kegiatan ini adalah belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor

lainnya. Output dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target output sebanyak 50 unit, terealisasi sebanyak 50 unit atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berjalan dengan baik, serapan anggaran tidak mencapai 100 % dikarenakan dilakukan efisiensi.

22. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 0 ter realiasi sebesar Rp.0 tidak adanya realiasi di sub kegiatan ini dikarenakan Anggaran di *refocusing*.

G. Inovasi

Inovasi pada Dinas Kehutanan yang diikutsertakan dalam Lomba Inovator Sumatera Selatan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Budidaya Lebah Apis mellifera sebagai Resolusi Konflik di Areal Konsesi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Paramita Mulia Langgeng pada Kawasan Hutan lakitan Utara I oleh Edi Cahyono, S.Hut, M.Si - Kepala UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong.

Tujuan Inovasi :

Terselesainya konflik tenurial antara kelompok Masyarakat / KTH dengan Pemegang Konsesi PBPH dengan memanfaatkan potensi tanaman Acacia mangium sebagai pakan lebah untuk budidaya lebah jenis Apis mellifera yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan dan hutan pun terjaga.

Manfaat Inovasi :

- a. Resolusi konflik dengan memanfaatkan potensi tanaman Acacia mangium sebagai pakan lebah
 - b. Meningkatnya ketrampilan KTH dalam budidaya lebah mulai perbanyakan koloni lebah, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran hasil.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar hutan melalui budidaya lebah dari hasil madu bernilai ekonomi.
 - d. Terjaganya hutan dari kebakaran dan illegal logging.
2. Strategis Pemasaran Madu yang Terintegrasi Untuk Meningkatkan Efektifitas Pendampingan Terhadap Peternak Lebah Trigona oleh M Agung Hadi Saputro, S.Hut Penyuluh pada UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti.
- Tujuan Inovasi :
- a. Meningkatkan daya saing madu Trigona Sumatera Selatan

- b. Memberi pendampingan peternak dalam strategi pemasaran modern (branding, pemasaran digital, manajemen distribusi)
- c. Meningkatkan pendapatan petani dengan akses pasar yang lebih luas
- d. Mendorong inovasi produk baru atau diversifikasi.

Manfaat Inovasi :

Meningkatkan penjualan, pemberdayaan peternak dan kesejahteraan peternak serta berdampak sosial ekonomi, dan lingkungan.

3. Aplikasi monitoring konservasi keanekaragaman hayati.

Tujuan Inovasi :

Pelaporan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati oleh pengelola Kawasan hutan baik PBPH maupun PPKH dapat dilakukan melalui web ini.

Manfaat Inovasi :

Informasi keanekaragaman hayati dapat termonitor dengan baik. Pelaporan tersebut menjadi bahan database keanekaragaman hayati Sumatera Selatan.

H. Penghargaan

1. Penghargaan dari Kementerian Kehutanan sebagai Pemerintah Daerah Berkomitmen Nyata Dalam Percepatan Penyelesaian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Dalam Kawasan Hutan seluas 2.341 Hektar.



Gambar 20. Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Kehutanan

2. Penghargaan dari Kementerian Kehutanan Penetapan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang Efektif dalam Mendukung Masyarakat Mandiri dan Hutan Lestari Tahun 2024 sesuai Keputusan Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu :

- a. UPTD KPH Wilayah IX Subanjeriji dengan nilai 85,15
 - b. UPTD KPH Wilayah VII Semendo dengan nilai 84,775
 - c. UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah dengan nilai 84,775
 - d. UPTD KPH Wilayah XII Benakat dengan nilai 77,43
3. Penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan nilai 84,69 (Kategori: A)

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mengetahui/ mengukur kinerja. Beberapa indikator kinerja, program dan kegiatan/sub kegiatan belum dapat diukur ketercapaiannya, karena merupakan proses rangkaian aktifitas/aksi yang sistematis selama satu tahun.

Realisasi kinerja Dinas Kehutanan yang ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan sangat tinggi. Hal ini didukung oleh 5 (lima) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan. Nilai efisiensi kegiatan APBD Dinas kehutanan secara keseluruhan 67,13 termasuk kategori efisien (70%-60%). Sedangkan untuk kegiatan yang tidak menunjang keberhasilan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) sub kegiatan yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; (3) Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (4) Dinas Kehutanan telah melakukan Pengarusutamaan Gender baik pada kegiatan di Dinas Kehutanan maupun pada tingkat tapak.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai media akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini, dirasakan belum pada taraf sempurna dan belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Kol H. Burlan Punti Kayu Km 6.5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 411476 Fax (0711) 411479. Kode Pos 30125
E-Mail : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Website: www.dishutsumsel.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandji Tjahjanto, S.Hut.,M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

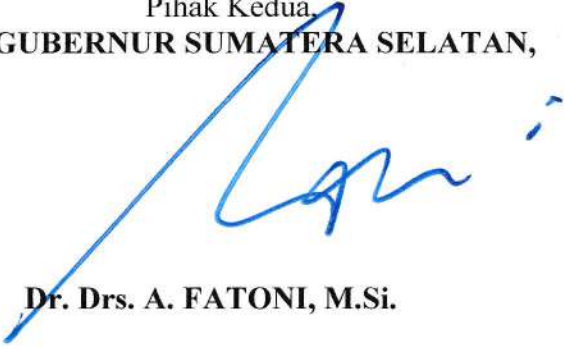
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang,

2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


Dr. Drs. A. FATONI, M.Si.

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


PANDJI TJAHJANTO, S.Hut.,M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19671102 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp. 73.795.118.040,-
2.	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu	36 Lokasi
		Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan	10,51%
3.	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman	10 Hektar
		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0,14%
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan	140 Kelompok
5.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 49.150.784.000	APBD
2. Pengelolaan Hutan	Rp. 1.616.865.700	APBD/DBH SDA Kehutanan-DR
3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp. 84.280.000	APBD
4. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp. 237.100.000	APBD/DAK
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 40.000.000	APBD

Palembang,

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

PANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19671102 199403 1 003